

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

PROSIDING RAPAT KERJA

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

BOGOR, 7-8 MEI 1991



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JALAN RAYA PAJAJARAN BOGOR

Telepon 327751, 323081 Pesawat 218 & 293

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Mei 1991 di Aula LPM IPB, disusun menjadi sebuah buku prosiding. Prosiding ini berisi laporan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan serta rumusan hasil Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB. Dia juga berisi kumpulan makalah Rapat Kerja, hasil diskusi, sambutan Ketua LPM, serta sambutan dan pengarahan Rektor Institut Pertanian Bogor.

Makalah-makalah yang disajikan dalam dua hari Rapat Kerja LPM IPB ini ada sebanyak 16 makalah. Dimana disampaikan dua buah makalah dari undangan, yaitu dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat dan Biro Bina Pemerintahan DKI Jakarta. Empat belas makalah lainnya adalah makalah-makalah yang disajikan oleh unit-unit pelaksana kegiatan akademis IPB. Makalah-makalah tersebut menyajikan tentang program kegiatan di lingkungan Fakultas dan juga beberapa pemikiran dasar tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta suatu tujuan tentang peran Institut Pertanian Bogor dalam Pengabdian kepada Masyarakat di daerah.

Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB dapat berlangsung dengan baik berkat kerjasama aktif dari semua anggota panitia. Ketua dan Sekretaris Sidang, para pembawa makalah, tim perumus serta rekan-rekan peserta raker. Kepada semua pihak yang terlibat tersebut, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Kepada peserta dari Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ditjen Bangdes, Bangda dan Pemerintah Daerah serta teman-teman staf Pengajar IPB, tak ketinggalan kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas peran serta yang diberikan.

Tiada lain tujuan kita melakukan Raker ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara langsung dan melembaga kepada sasaran kita, yaitu kepada masyarakat luar kampus, termasuk masyarakat nasional maupun internasional, dalam rangka mencapai suatu masyarakat adil dan makmur serta terbentuknya manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Demikianlah prosiding ini kami susun. Semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat secara utuh dan bermanfaat untuk pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) untuk periode tahun 1991-1993.

Bogor, 8 Mei 1991
Ketua Panitia/Sekretaris LPM IPB

Dr. Ir. TANTAN R. WIRADARYA

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |

BAGIAN A: PENDAHULUAN DAN RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA

| | |
|---|--------|
| I. PENDAHULUAN | A - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | A - 1 |
| 1.2. Kerangka Pemikiran | A - 1 |
| 1.3. Tujuan Rapat Kerja | A - 3 |
| 1.4. Topik-topik yang Dibahas dan Metode Pembahasannya | A - 3 |
| 1.5. Waktu dan Tempat | A - 4 |
| 1.6. Peserta Rapat Kerja | A - 4 |
| 1.7. Penyelenggara Rapat Kerja | A - 4 |
| II. RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA | A - 5 |
| III. RANGKUMAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE 1991 - 1993 | A - 10 |

BAGIAN B: SAMBUTAN-SAMBUTAN

| | |
|--|--------|
| 1. Sambutan Ketua LPM IPB dalam Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPR | B - 1 |
| 2. Pengarahan Rektor IPB dalam acara pembukaan Rapat Kerja LPM IPB | B - 4 |
| 3. Sambutan PR I pada penutupan Rapat Kerja LPM IPB ... | B - 10 |

BAGIAN C: PENYAJIAN MAKALAH DAN DISKUSI

| | |
|---|--------------------|
| I. SESSION I | |
| 1.1. Makalah | |
| 1.1.1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 1987-1990 (Oleh: Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira/ Ketua LPM) | RLPM _I |
| 1.1.2. Program serta Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat periode 1991-1993 (Oleh: Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira/ Ketua LPM IPB) | RLPM _{II} |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| 1.1.3. | Koordinasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan IPB, Sistem Organisasi dan Mekanisme Kerja LPM IPB (Oleh: Prof.Dr.Ir.H. Sadan Widarmana/ Pembantu Rektor I IPB) | RLPM _{III} |
| 1.2. | Notulen Diskusi Session I, hari pertama | C _I -1 |
| II. SESSION II | | |
| 2.1. | Makalah | |
| 2.1.1. | Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Pertanian, Tahun 1991-1993 (Oleh: Dr.Ir. Bambang Pramudya) | RLPM _X |
| 2.1.2. | Program Pengabdian kepada Masyarakat secara Terpadu Fakultas Kedokteran Hewan IPB Tahun 1991-1993 melalui Kegiatan Satuan Tugas Klinik Hewan Keliling (Oleh: drh. Sunarya Prawira-disastra) | RLPM _Y |
| 2.2. | Notulen Diskusi Session II, hari pertama | C _{II} -1 |
| III. SESSION III | | |
| 3.1. | Makalah | |
| 3.1.1. | Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Perikanan IPB Periode 1991-1993 (Oleh: Dr.Ir. Kadarwan Soewardi) | RLPM _{VI} |
| 3.1.2. | Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Peternakan IPB Periode 1991-1993 (Oleh: Dr. Pallawarukka) | RLPM _{VII} |
| 3.1.3. | Program Pengabdian kepada Masyarakat Fmipa IPB Tahun 1991-1993 (Oleh: Dr.Ir.H. Ansvori A. Mattjik) .. | RLPM _{VIII} |
| 3.2. | Notulen Diskusi Session III, hari pertama ... | C _{III} -1 |

IV. SESSION IV

4.1. Makalah

4.1.1. Program Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas Kehutanan IPB Periode 1991-
1993
(Oleh: Dr.Ir. Yahya Fakuara) RLPM_{IX}

4.1.2. Program Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas Pertanian IPB Periode 1991-
1993
(Oleh: Dr.Ir. Hidayat Syarief) RLPM_{IV}

4.2. Notulen Diskusi Session IV, hari pertama C_{IV}-1

V. SESSION V

5.1. Makalah

5.1.1. Teknologi Pertanian Tepatguna Pemun-
jangan Pembangunan
(Oleh: Dr.Ir.H. Lutfi I. Nasoetion/
Lembaga Penelitian IPB RLPM_{XI}

5.1.2. Teknologi Pertanian Tepatguna Pemun-
jangan Pembangunan
(Oleh: Dr.Ir. Hidayat Syarief/PAU-IPB). RLPM_{XII}

5.2. Notulen Diskusi Session V, hari kedua C_V-1

VI. SESSION VI

6.1. Makalah

6.1.1. Peranan IPB dalam Pembangunan/Pengem-
bangan Wilayah
(Oleh: Drs. Arifin Yoesoef/Ketua
Bappeda DT I Jabar RLPM_{XIII}

6.1.2. Peranan IPB dalam Pembangunan/Pengem-
bangan Wilayah
(Oleh: Drs. H. Muhamad Amin/Kepala
Biro Bina Pemerintahan DKI Jakarta)... RLPM_{XIV}

6.2. Notulen Diskusi Session VI, hari kedua C_{VI}-1

VII. SESSION VII

- 7.1. Makalah
 - 7.1.1. Pelayanan Informasi Teknologi Pertanian kepada Masyarakat
(Oleh: Ir. Janti G. Sujana/LSI) RLPM_{XV}
 - 7.1.2. Diseminasi Ipteks kepada Masyarakat
(Oleh: Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis) RLPM_{XVI}
- 7.2. Notulen Diskusi Session VII. hari kedua CVII-1

BAGIAN D: LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Salinan dari Salinan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 035/Um/1991, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Tanggal 7-8 Mei 1991 .. D - 1
- 2. Jadwal Acara Rapat Kerja LPM IPB, Tanggal 7 dan 8 Mei 1991 D - 3
- 3a. Daftar Peserta Rapat Kerja LPM IPB Hari Pertama, Tanggal 7 Mei 1991 D - 5
- 3b. Daftar Peserta Rapat Kerja LPM IPB Hari Kedua, Tanggal 8 Mei 1991 D - 6
- 4. Beberapa Foto Aktivitas Rapat Kerja LPM IPB, tanggal 7 dan 8 Mei 1991 D - 7

BAGIAN A
PENDAHULUAN & RUMUSAN HASIL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 22 Ayat 1 dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pada penjelasan Pasal 22 Ayat 1 dikemukakan bahwa pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut TriDarma Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 43 Ayat 2 mengemukakan bahwa Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tersebut maka telah tergarislah dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat di perguruan tinggi yang baru. Maka dari itu, Institut Pertanian Bogor seharusnya segera mengantisipasi kebijakan pemerintah tersebut dengan penyusunan Statuta Institut Pertanian Bogor, yang didalamnya tercantum pedoman dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.

Selanjutnya, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IPB yang mengemban wewenang Rektor untuk melaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus segera menjabarkan pedoman-pedoman yang telah digariskan tersebut dalam bentuk program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat teknis operasional dan terproyeksi pada suatu dimensi waktu yang lebih jelas dan sekaligus menyesuaikan sistem organisasi dan mekanisme kerjanya dengan pedoman dasar yang baru tersebut.

1.2. Kerangka Pemikiran

Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya manusia Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan batasan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya berupaya:

- (1) Memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha pembangunan.
- (2) Memperdalam kemampuan perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melalui peningkatan kualitas dan relevansi terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
- (3) Mempercepat pembangunan masyarakat belajar dan mampu berkarya, sehingga berguna bagi pembangunan bangsa dan negara (Yayah Koswara, 1991).

Margono Slamet (1991) mengemukakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi, oleh karena itu pelaksanaannya perlu dilakukan dan didukung oleh segenap warga perguruan tinggi dengan pengertian yang cukup tentang konsep pengabdian kepada masyarakat dan metoda-metoda pelaksanaannya.

Selanjutnya dikemukakannya bahwa kelompok sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat di luar kampus perguruan tinggi yang sudah tidak lagi terjangkau dan tidak tercakup oleh program pendidikan formal. Kelompok sasaran ini bisa perorangan, kelompok, organisasi pemerintah atau swasta, atau komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

Sejak dilahirkannya pada tanggal 1 September 1963, IPB telah berkembang dengan pesat. Sekarang masyarakat kampusnya telah sedemikian besar dan kompleknya. Unit pelaksana akademisnya juga sudah terdiri dari 7 fakultas, lembaga penelitian, pusat antar universitas, lembaga sumber daya informasi dan lembaga pengabdian kepada masyarakat sendiri.

Masyarakat diluar kampus pun, karena dampak pembangunan, telah bertambah maju pula. Beberapa problematik pembangunan telah terpecahkan, namun sementara itu beberapa problem lainnya perlu segera ditangani secara bertahap.

Dengan demikian, dalam menunjukkan jati dirinya sebagai pelopor pembangunan di bidang pertanian, IPB perlu mengkonsolidasikan diri lebih mantap dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya karena tantangan yang dihadapinya jauh lebih rumit dari masalah-masalah sebelumnya.

Berdasarkan pemikiran inilah maka suatu Rapat Kerja Pengabdian kepada Masyarakat akan diadakan untuk menjabarkan dasar/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah digariskan pemerintah dan pimpinan IPB kedalam program-program pengabdian kepada masyarakat yang lebih teknis-operasional yang didukung oleh suatu sistim koordinasi kegiatan yang lebih mantap.

1.3. Tujuan Rapat Kerja

Rapat kerja pengabdian kepada masyarakat Institut Petanian Bogor ini diharapkan dapat:

- (1) Menggariskan beberapa program dan strategi dasar pengabdian kepada masyarakat IPB untuk periode 1991-1993
- (2) Merumuskan struktur organisasi dan sistim mekanisme kerja LPM-IPB yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
- (3) Merumuskan sistim koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB

1.4. Topik-topik yang Dibahas dan metode Pembahasannya

Topik-topik yang dibahas dalam Rapat Kerja adalah:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat: periode 1987-1990 (Makalah 1), dan Program serta Strategi Pengabdian kepada Masyarakat Periode 1991-1993 (Makalah 2).
Oleh : LPM IPB (Makalah 1 dan 2)
2. Koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB, sistem organisasi dan mekanisme kerja LPM IPB.
Oleh : Pembantu Rektor I
3. Program pengabdian kepada masyarakat Fakultas periode 1991-1993.
Oleh : Pembantu Dekan I Fakultas IPB (Makalah 4-10)
4. Teknologi pertanian tepatguna, penunjang pembangunan.
*Oleh : - Lembaga Penelitian IPB (Makalah 11)
- Pusat Antar Universitas IPB (Makalah 12)*
5. Peranan IPB dalam Pembangunan/Pengembangan Wilayah
*Oleh : - Bappeda Tingkat I Jawa Barat (Makalah 13)
- Biro Bina Pemerintah DKI Jaya (Makalah 14)*
6. Pelayanan Informasi Teknologi Pertanian kepada Masyarakat.
Oleh : Lembaga Sumberdaya Informasi IPB (Makalah 15)
7. Diseminasi IPTEK Pertanian dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia pembangunan.
Oleh : LPM IPB (Makalah 16)

Metoda pembahasan makalah adalah berbentuk Sidang Pleno dimana dua makalah yang berkaitan disajikan lebih dahulu kemudian dibahas bersama dalam waktu diskusi yang sama (lihat jadwal acara pada Lampiran 2).

1.5. Waktu dan Tempat

Kegiatan Raker PPM ini dilaksanakan tanggal. 7 dan 8 Mei 1991, bertempat di Aula LPM IPB, Jl. Raya Pajajaran Bogor (Telp. 327751).

1.6. Peserta

Peserta Raker PPM ini terdiri dari:

1. Rektor IPB
2. Pembantu Rektor I IPB
3. PD I Fakultas/Komisi PPM Fakultas
4. Ketua dan sekretaris, LPM, LP, LSI dan PAU IPB
5. Pusat di lingkungan LPM IPB
6. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Barat
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan DKI Jaya
8. Ketua Bappeda Kab. Kerjasama
9. Dir Bangda Ditjen Bangda Depdagri
10. Bangdes Depdagri
11. Para Mantan Ketua LPM IPB
12. Tim Pengelola Kerjasama LPM IPB

1.7. Penyelenggaraan Rapat Kerja

Rapat Kerja PPM ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB. Susunan Panitia Pelaksana Rapat Kerja LPM IPB ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

II. RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA

Butir-butir perumusan yang dianggap penting sebagai suatu hasil dari diskusi dua hari pada Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB, adalah menyangkut sistematika sebagai berikut:

1. Pemikiran Dasar.
2. Rencana Dasar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Program-program Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Strategi Program Pengabdian kepada Masyarakat, serta
5. Sistem Koordinasi, dan
6. Lain-lain

1. Pemikiran Dasar

Pertama, bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan sektor pertanian akan dihadapkan kepada masalah-masalah sebagai akibat dari proses transformasi struktur, sosial, ekonomi dan politik. Di sini ditekankan bahwa pembangunan pertanian pada dasarnya masih memegang peranan penting, sekurang-kurangnya pada satu dekade yang akan datang, baik dalam peningkatan pendapatan petani, pendapatan nasional maupun penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan hal ini, maka upaya untuk meningkatkan peranan IPB di dalam melaksanakan tridarma, khususnya pengabdian kepada masyarakat adalah suatu keharusan.

Kedua, kita mengetahui bahwa Presiden/pemerintah telah mengeluarkan/mengundang UU RI No. 2/tahun 1989 dan PP No. 30/Tahun 1990. Kedua peraturan ini, akan mencerminkan perubahan struktur-struktur kelembagaan di Perguruan Tinggi, khususnya di IPB yang menyangkut: (1) garis-garis besar program, (2) strategi dasar program-program yang lebih spesifik, serta (3) sistem koordinasi kelembagaan.

Ketiga, bahwa di dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PM) yang dilakukan oleh IPB, khususnya yang dilakukan LPM selaku pelaksana dan koordinator; disamping menghasilkan kegunaan-kegunaan yang nyata bagi masyarakat luas, ternyata tidak luput juga dari masalah-masalah yang dihadapi.

Keempat, dari diskusi yang berkembang, pihak Penda dan Departemen-departemen teknis menganggap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PM) yang dilakukan oleh IPB memiliki peranan dan manfaat penting di dalam pembangunan dan perlu ditingkatkan di masa-masa datang.

2. Rencana Dasar Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan pemikiran dasar tadi, maka dicoba dirumuskan suatu rencana dasar:

1. LPM IPB atau IPB secara keseluruhan perlu meningkatkan sistem koordinasi, termasuk di dalamnya komunikasi kelembagaan, baik di dalam IPB maupun di luar IPB.
2. Pengelolaan sistem informasi manajemen di IPB perlu dikembangkan. Dalam kaitan ini, maka SIM (Sistem Informasi Manajemen) akan bermanfaat dan digunakan untuk menyusun sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.
3. IPB perlu meningkatkan peranannya dalam merumuskan pengembangan wilayah dalam hal model sistem usahatani, sistem pembangunan pertanian, sistem pengembangan agroindustri, dan sebagainya.
4. Perlu ditingkatkannya suatu pola pengembangan sumberdaya manusia yang menyangkut aktivitas pendidikan, pelatihan dan proses-proses perubahan perilaku manusia yang lainnya.
5. Perlu ditingkatkannya pengembangan pelayanan informasi teknologi dan kelembagaan, untuk menjawab masalah-masalah yang berkembang di masyarakat luas.
6. Perlu ditingkatkannya pengelolaan dan pengembangan KKN, sebagai suatu jalur proses integrasi dari tiga darma, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
7. Perlu dikembangkannya jenis dan jumlah khalayak sasaran PM yang tidak saja untuk khalayak di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Selain itu tidak mustahil pelayanan PM kepada khalayak asing/luar negeri juga perlu ditingkatkan.

3. Program-program Pengabdian kepada Masyarakat

Dari rencana dasar tadi, maka dijabarkan secara ringkas program-program Pengabdian kepada Masyarakat (PM) menurut bidangnya. Bidang-bidang tersebut adalah:

1. Hubungan Kerjasama

IPB, baik LPM maupun lembaga-lembaga yang lain/unit-unit yang lain perlu meningkatkan hubungan kerjasama, baik di dalam maupun di luar IPB. Secara lebih khusus, hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dan departemen teknis sektoral perlu ditingkatkan dengan dasar saling memperoleh manfaat.

Dianjurkan LPM-IPB agar lebih aktif lagi menawarkan program-program PM kepada pemerintah daerah, departemen-departemen teknis dan swasta secara terencana.

2. Program PM dalam Pengembangan Wilayah

Dalam bidang ini tiga butir yang perlu dikembangkan oleh unit Pengembangan Wilayah, yaitu:

- a. Perlu ditingkatkannya suatu perumusan pola perencanaan pembangunan wilayah.
- b. Perlu ditingkatkannya suatu aktivitas uji-coba dan kaji tindak, sehingga upaya memperoleh masukan-masukan bagi penyusunan model pembangunan wilayah dapat dipenuhi.
- c. Perlu adanya upaya pengembangan program peningkatan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan daerah secara jangka panjang.

3. Bidang Pelayanan Informasi Teknologi

Dua butir yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut adalah:

- a. Perlu ditingkatkannya suatu rintisan pelayanan informasi dan teknologi, baik untuk individu atau lembaga di dalam maupun di luar IPB.
- b. Perlu ditingkatkannya program-program atau kegiatan tukar-menukar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui surat menyurat, publikasi, diskusi dan seminar-seminar dengan berbagai pihak.

4. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Program ini memiliki tiga butir pokok di dalam pengembangan programnya, yaitu:

- a. Perlu ditingkatkannya upaya IPB di dalam mencoba mengisi proses perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam menghadapi era proses tinggal landas. Dalam kaitan ini perlu ditelaah pendekatan bagaimana IPB mampu melakukan suatu program Pengabdian kepada Masyarakat (PM) yang bisa memotivasi masyarakat untuk berkehendak di dalam memasuki setiap proses perubahan.
- b. Program-program pendidikan, program-program pelatihan dan program-program yang terkait pada pengembangan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang sedemikian berkembangnya.
- c. Perlu dikaji suatu model pendidikan berkesinambungan (continuing education)

5. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan KKN

- a. Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan KKN merupakan suatu keharusan dan ini terkait dengan adanya sistem koor-

- dinasi ke dalam dan ke luar yang perlu terus-menerus ditingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah mampu menggalang sumberdaya-sumberdaya yang inkonvensional, baik yang datangnya dari lingkungan IPB itu sendiri maupun yang datangnya dari luar.
- b. Orientasi program KKN tidak hanya untuk menangani masalah-masalah di pedesaan saja tetapi juga di perkotaan.
 - c. Pelatihan pembekalan KKN perlu terus ditingkatkan terutama dalam segi-segi bobot isi, pelatih dan berorientasi pada kebutuhan dan masalah-masalah nyata di lapangan.
 - d. Berdasarkan pengamatan dari pelaksanaan KKN selama ini, maka kesinambungan KKN seharusnya diikuti oleh adanya Program Pasca KKN. Karena Pasca KKN bukan semata-mata merupakan program milik IPB, maka program ini seharusnya didukung oleh pihak-pihak pengguna, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait.

4. Strategi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk pelaksanaan program-program Pengabdian kepada Masyarakat (PM) di atas, maka dirumuskan suatu strategi dasar yang dapat bisa dipakai sebagai strategi payung bagi pelaksanaan PM di IPB, sebagai berikut:

- a. Strategi Dasar Konsolidasi Organisasi, baik ke Dalam maupun Ke Luar IPB termasuk dengan Pihak Luar Negeri

Konsolidasi di sini menyangkut membenahan-pembenahan atau penguatan sendi-sendi keorganisasian, termasuk menyangkut bagaimana LPM IPB mampu menyusun suatu pedoman pokok, program serta uraian tugas sehingga PM bisa dikoordinasikan secara efektif. Kemudian konsolidasi ke luar, perlu ditingkatkannya suatu hubungan kerjasama, tidak saja di dalam suatu hubungan kerjasama institusional tetapi lebih dari itu yaitu suatu hubungan kerjasama yang bersifat operasional, terpadu dan terencana.

- b. Strategi Dasar Integrasi

Strategi ini menitikberatkan, bahwa PM yang dilaksanakan oleh IPB tidak lepas dengan program-program pembangunan nasional dan pembangunan regional. Dari sisi lain, dengan strategi integrasi, program PM seharusnya juga merujuk dan mendukung program dan tujuan IPB itu sendiri.

- c. Strategi Dasar Pengembangan

Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai suatu aktivitas rutin saja, tetapi lebih dari itu. Aktivitas PM seyogyanya merupakan proses yang berkembang dan tidak terbatas untuk berorientasi pada masalah pedesaan saja tetapi juga perkotaan. Dengan demikian pengertian pengembangan bisa

memiliki ciri bahwa IPB seharusnya semakin aktif mengambil "bola", ketimbang menunggu "bola" atau seharusnya mampu menciptakan permintaan. Selain itu pengembangan PM tidak saja dilakukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja tetapi juga luar negeri. Hal demikian tidak luput dari adanya kondisi logis globalisasi berbagai dimensi pembangunan di dalam dan di luar negeri.

5. Sistem Koordinasi

Sistem koordinasi PM menyangkut aspek-aspek sbb:

1. Sistem koordinasi PM disusun berdasarkan PP No. 30/tahun 1990 dimana LPM merupakan unsur pelaksana dan koordinator pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat IPB.
2. Koordinasi PM di lingkungan IPB perlu terus ditingkatkan agar supaya terjadi suatu kondisi yang kondusif, efektif, efisien, memperkecil duplikasi program, dan saling menguntungkan antar unit-unit yang ada dan juga dengan pihak luar.
3. Untuk melaksanakan PM, maka IPB dalam hal ini LPM IPB perlu merumuskan suatu pedoman pokok yang lebih sempurna lagi dari yang sudah ada, yang menyangkut uraian kerja, gambaran fungsi dan peranan unit-unit yang ada, hak dan kewajiban, serta strategi dan program pengembangan PM.
4. Penyebarluasan/diseminasi ilmu dan teknologi dirasakan merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh IPB; bukan hanya oleh LPM saja, tetapi oleh unit-unit yang ada di IPB. Koordinasi penyebaran informasi perlu dibicarakan lebih intensif lagi di antara unit-unit di IPB, dalam hal ini LPM, LSI, LP dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IPB.

6. Lain-lain

1. Rumusan yang lebih terinci akan segera disusun oleh suatu tim kecil, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur LPM, LSI, LP, dan fakultas.
2. Tim kecil ini pun diharapkan mampu menyeleksi program-program yang lebih spesifik, baik yang menyangkut monodisiplin mau pun yang menyangkut inter/multi disiplin.
3. Di tingkat IPB, dengan koordinasi Pembantu Rektor I, akan diadakan suatu diskusi/rapat kerja mini atau terbatas untuk merumuskan sistem koordinasi program PM yang lebih jelas dan operasional.

**III. RANGKUMAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE 1991-1993**

| No. Fakultas | Program | Topik | Waktu | Keterangan |
|--------------|--|---|-----------|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1. LPM IPB | | | 1991-1993 | Sumberdana Penda & Lain-lain |
| | a. Pusat Pengembangan Wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Proyek Pembangunan Daerah dalam Rakorbang 2. Konsultasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 3. Menerapkan teknologi tepatguna dibidang pertanian terpadu 4. Membina dan menggerakkan kelompok masyarakat dalam kegiatan pertanian terpadu 5. Melakukan rehabilitasi dan konservasi 6. Melaksanakan kegiatan sistem kredit berputar (Revolving Fund) 7. Memperkenalkan berbagai alternatif usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya 8. Membina pengelolaan suatu Usaha bersama | | |
| | b. Pusat Pelayanan Informasi Teknologi Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Media Informasi "Warta Pengabdian, IPB" 2. Penerbitan Buku Kumpulan Teknologi Tepat Suna 3. Penerbitan Buku Kumpulan Kegiatan PPM oleh Tenaga Dosen IPR | | <ul style="list-style-type: none"> - Terbit 3 bl.sekali - Ruang Lingkup IPB - Sumber bahan berita dari LPM, Fakultas dan Lembaga di IPB. - Pelaksana Pusat PSM peserta dari Fakultas, Lembaga dan perorangan - Sumberdana dari kerjasama LPM IPB dengan LSI IPB - Terbit setiap tahun - Ruang lingkup IPB dan LPM di PTN dan PTS se Indonesia - Sumber dana LPM-IPB |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|---|-----------|--|
| | | | 4. Partisipasi dalam Pameran HAPSAK PANCASILA | 1991-1993 | <ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelaksanaan bulan Oktober 1991, 1992 dan 1993 di Bogor - Peserta Stand IPB adalah Fakultas dan Lembaga. - Sumber dana dari IPB, LPM dan LP IPR |
| | | | 5. Partisipasi dalam Pameran RISTEK | 1992-1993 | <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelaksanaan bulan Januari-Februari 1992 & 1993 di Jakarta - Peserta stand IPB adalah Fakultas, dan Lembaga. - Sumberdana dari JPB, LP & LPM IPR. |
| | | | 6. Pemantapan Desa Mitra | 1991-1992 | <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelaksanaan adalah bulan September 1991 s.d Januari 1992 - Peserta Staf Pengajar & mahasiswa profesi di IPB. - Sumberdana ; OPF |
| | | | 7. Partisipasi dalam Seminar Dies Natalis IPB tentang pendidikan herkelanjutan | 1991 | <ul style="list-style-type: none"> - waktu pelaksanaan bulan Sept. 1991 di IPB Rogor - Peserta dari IPB dan Instansi luar serta Alumni IPB - Sumber dana LPM IPB |
| | | | 8. Partisipasi dalam Seminar Dies Natalis IPB, tentang Peranan Perkebunan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II | 1991 | <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelaksanaan September 1991 di IPB Rogor - Peserta dari IPB dan Instansi luar serta Alumni IPB - Sumber Dana Sponsor Swasta |
| | | | 9. Seminar tentang "Tenaga Kerja bidang Pertanian menuju Era Agro Industri" | 1991 | <ul style="list-style-type: none"> - waktu pelaksanaan bulan Des. 1991 di IPR Bogor - Peserta dari IPB dan Instansi luar. - Sumber dana dari Depnaker, Dept. Perindustrian & Sponsor Swasta. |
| | | | 10. Seminar "Model dan Teknik Penyuluhan Pertanian era lepas landas". | 1992 | <ul style="list-style-type: none"> - waktu pelaksanaan bulan Februari 1992 di IPB Bogor - Peserta dari LPM IPB, Deptan, dan Perguruan Tinggi - Sumber dana dari IPB, Deptan, dan peserta. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|-----|-----|--|-----------|---|
| | | | 11. Lokakarya Peningkatan Pen- depatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahan kering | 1997 | - waktu pelaksanaan bulan Maret 1997 di Bogor - Peserta dari LPM IPR dan Pemda Jabar dan LP IPR - Sumber dana dari Pemda Jabar, OPF dan peserta. |
| | | | 12. Lokakarya Peningkatan Pe- ngetahuan dan keterampilan menyusun skrip Siaran Pe- desaan bagi petugas-petugas di instansi terkait di Kab. dan Kodya Bogor. | 1991 | - waktu pelaksanaan bulan Juni 1991 di Bogor - Peserta dari IPR dan Instansi Pemerintah di Kab. dan Kodya Bogor - Sumber dana dari LPM dan Dispen- da/Bupati Bogor. |
| | | | 13. Pengisian Acara Siaran Pe- desaan pada RRI Regional Bogor. | 1997 | - waktu pelaksanaan bulan Maret 1997 di Bogor - Peserta dari IPR dan Instansi Pemerintah di Kodya dan Kab. Bogor. - Sumber dana dari LPM dan Pemda Kab. BT II Bogor. |
| | | | 14. Lokakarya Evaluasi Penge- lolaan KKN. | 1991-1993 | - waktu pelaksanaan untuk ke- giatan tahun Anggaran 1991/1992 dan tahun anggaran 1992/1993 di Bogor - Peserta adalah Tim Evaluasi KKN dan Petugas PPM di Fakultas-Fa- kultas serta PD I-PD I Fakultas. - Sumber dana dari OPF. |
| | | | 15. Temukarya Kontak Tani Andalan | 1991 | - waktu pelaksanaan bulan Sept. 1991 di IPR Bogor - Peserta dari IPR dan Instansi luar serta Alumni IPR - Sumber dana LPM IPR |
| c. Pusat Pengembangan Sumberdaya | | | 1. Pelatihan Metodologi Pe- ngabdian pada Masyarakat bagi Dosen PTS se- Jawa. 2. Kursus Taman Rumah 3. Kursus Singkat Penyegar- an Administrasi Perkan- toran di Lingkungan IPR. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | 4. Lokakarya Menyusun Bahan Pengajaran Perkuliahan dan Penuntun Praktikum (lanjutan) | | |
| | | | 5. Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian PKK Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kerjasama. | | |
| | | | 6. Pelatihan Nasional Penghijauan dan Pertamanan Kota Angkatan II | | |
| | | | 7. Pelatihan Petugas Lapangan Hutan Sengon Laut | | |
| | | | 8. Pelatihan Pengelolaan Usahatani Sengon Bagi Manajer KUD | | |
| | | | 9. Pelatihan Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat (Sengonisasi); | | |
| | | | 10. Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan (Continuing Education Training) | | |

d. Pusat P2KKN

1. Mengevaluasi dan menetapkan pedoman/keputusan pokok pelaksanaan KKN IPB (terus-menerus);
2. Menyelenggarakan KKN;
3. Meningkatkan kerjasama di dalam dan dengan pihak luar IPB;
4. Memantapkan mekanisme koordinasi pelaksanaan KKN;
5. Mengembangkan program dan pelaksanaan KKN melalui lokakarya evaluasi KKN;
6. Memanfaatkan hasil laporan KKN bagi penyusunan program PPM;
7. Merumuskan dan mengisi program tindak lanjut dari KKN dalam bentuk program-program PPM lainnya.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------|---|---|-----------|-----|---|
| 2. Fakultas Pertanian | - Pelatihan Singkat (short term training) | 1. Pelatihan bagi pelaku pembangunan pertanian dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Pertamanan - Pengelolaan gulma - Penanggulangan hama terpadu - Konservasi tanah - Monitoring dan evaluasi proyek - Manajemen agribisnis - Koperasi - Peranan wanita - Pemanfaatan pekarangan - Perencanaan pangan dan gizi masyarakat | 1991-1993 | - | |
| | - Penyuluhan | 2. Pelatihan Regional atau Internasional | 1991-1993 | - | |
| | - Pelayanan Informasi Teknologi Pertanian | 3. Penyuluhan dan Pelayanan jasa konsultasi | 1991-1993 | - | |
| | | 4. Pengembangan desa mitra kerja | 1991-1993 | - | melibatkan mahasiswa |
| | | 5. Penerbitan alat bantu pandang dengar untuk penyuluhan pertanian | 1991-1993 | - | |
| 3. Fakultas Kedokteran Hewan | - Pembinaan | 1. Konsolidasi dan pementapan organisasi Satgas Klinik Hewan Keliling FKH, kedalam dan ke luar Fakultas | 1991-1993 | - | Kerjasama dengan KUD/ GRSI |
| | - Kaji Tindak | 2. Menyusun konsep serta kaji tindak pelayanan teknis sapi perah secara terpadu | 1991-1993 | - | Titik berat pada masalah kesehatan dan reproduksi |
| | - Pelatihan | 3. Pelatihan untuk petugas pelayanan teknis di lapangan, antara lain: petugas inseminator, para medis, pemeriksa kebuntingan, asisten teknis reproduksi | 1991-1993 | - | |
| | | 4. Pelatihan tentang kualitas kontrol | 1991-1993 | - | |
| | | 5. Pelatihan tentang penyusunan modul-modul pemeliharaan sapi perah yang diperlukan di lapangan baik untuk peternak, pengelola KUD maupun petugas pelayanan teknis | 1991-1993 | - | |
| | - Penyuluhan | 6. Pembentukan wilayah binaan sapi perah dengan kegiatan yang lebih terarah dan berkesinambungan | 1991-1993 | - | upaya yang dilakukan adalah penyuluhan, percontohan, analisa ekonomi, pendayaan, dan kriteria monitoring serta evaluainya |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------|----------------------------------|-----|--|-----------|---|
| | - Pembinaan | | 7. Koordinasi dengan fakultas/PPM di lingkungan IPB dan Lembaga di luar IPB dalam menghimpun masukan-masukan pesan PPM | 1991-1993 | - |
| | | | 8. Koordinasi dengan fakultas/PPM di lingkungan IPB dan Lembaga di luar IPB dalam pengembangan usaha sapi perah dimasa yang akan datang. | 1991-1993 | - |
| 4. Fakultas Perikanan | - Kerjasama | | 1. Peningkatan pengelolaan Usaha budidaya Tambak Udang di PP TIR Karawang | 1991-1993 | Kerjasama dengan Proyek Pandu TIR |
| | | | 2. Penangkaran Ikan Arwana | 1991-1993 | Kerjasama dengan PHPA |
| | | | 3. Strategi pengelolaan populasi Penyu | 1991-1993 | Kerjasama dengan PHPA |
| | | | 4. Strategi pengelolaan kawasan konservasi laut | 1991-1993 | Kerjasama dengan PHPA |
| | - Pelatihan | | 5. Pelatihan Identifikasi Plankton di Tambak | 1991-1993 | Kerjasama dengan PP.TIR (sumber dana belum jelas) |
| | | | 6. Pelatihan calon Transmigran Tambak | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 7. Pelatihan penanggulangan penyakit udang | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 8. Pelatihan pemanfaatan sumberdaya perikanan di sekitar lokasi proyek pengeboran minyak. | 1991-1993 | Kerjasama dengan PT. Comodo |
| | - Penyuluhan | | 9. Pelayanan teknis pengelolaan tanah | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 10. Pembinaan Usaha Budidaya Air Tawar | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 11. Pelayanan pengelolaan pasca panen komoditi perikanan | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 12. Pembinaan peningkatan efisiensi alat tangkap perikanan pantai | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | | | 13. Pembinaan Koperasi Perikanan | 1992-1993 | (Sumber dana belum jelas) |
| | - Kaji Tindak (pengemb. Wilayah) | | 14. Pengembangan wilayah dan kaji tindak : Pengembangan perikanan pantai untuk menunjang pengembangan primata Pulau Tinjil | 1991-1993 | - |
| | | | 15. Pengembangan Wilayah dan Kaji Tindak : Pembuatan Rumpun Ikan Tuna untuk Masyarakat Nelayan Pelahuhan Ratu Jawa Barat | 1991 | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------|---|--|---|-----------|---|
| | | 2. Penyuluhan/ Pelatihan | 4. Biopres untuk pengembangan agroindustri | 1991-1993 | Sasaran Dept. Perindustrian, Biro Konsultan |
| | | | 5. Good Manufacturing Productive | 1991-1993 | |
| | | | 6. Pengelolaan dan teknik pengolahan air limbah industri. | 1991-1993 | |
| | | 3. Pembinaan | 7. Pembinaan Tujuh Desa Lingkar Kampus | 1991-1993 | Program kerjasama dengan Himpunan Profesi (Hipro) di Fateta |
| B. FNIPA | 1. Penyuluhan | 1. Kegiatan Pelayanan Umum meliputi : konsultasi, analisa data, kerjasama, pameran | | | |
| | 2. Pelatihan/ Kursus | 2. Kegiatan pelatihan terhadap kelompok dalam ilmu atau teknik, keilmuan mulai dari tingkat SMTA s.d. PT, meliputi ilmu bahasa, komputer, statistika, biologi, meteorologi, fisika, kimia, biokimia dan matematika | | | |
| 9. PAU | 1. Penelitian | | <u>Pangan dan Gizi</u> | | |
| | 2. Pelatihan singkat | | 1. Pengembangan produk Pangan dan Gizi | | |
| | 3. Seminar/Workshop | | 2. Pengembangan proses dan peralatan pengolahan | | |
| | 4. Magang | | 3. Peningkatan mutu pangan tradisional | | |
| | 5. Kegiatan pengumpulan kredit bagi staf yang mengikuti program S2 S3 | | 4. Pengendalian mutu | | |
| | 6. Pengembangan media instruksial | | 5. Keamanan dan keterjaminan pangan | | |
| | 7. Karyasiswa | | <u>Ilmu Hayat</u> | | |
| | | | 1. Peningkatan mutu genetik ternak | | |
| | | | 2. Peningkatan mutu pakan | | |
| | | | 3. Pengawasan penyakit ternak | | |
| | | | 4. Pelestarian plasma nutfah | | |
| | | | <u>Bioteknologi</u> | | |
| | | | 1. Kultur jaringan dan seleksi genetik tanaman | | |
| | | | 2. Identifikasi penciri genetik | | |
| | | | 3. Kerentanan hewan terhadap penyakit | | |
| | | | 4. Pemanfaatan mikoriza | | |
| | | | 5. Peningkatan produksi tanaman Kehutanan. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 10. | DKI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra baru di wilayah pengembangan Barat dan WP Timur 2. Pembangunan pemukiman terarah di WP Barat dan WP Timur 3. Peningkatan pelaksanaan program perbaikan lingkungan 4. Pengembangan Taman Nasional Laut dan Pariwisata di Kep. Seribu. 5. Pembangunan ruang terbuka hijau di WP Timur Laut, WP Barat dan WP Selatan. 6. Pembangunan instalasi air minum haru dan rehabilitasi jaringan yang ada 7. Pengendalian laju kegiatan ekonomi penduduk dan penyebarannya. 8. Peningkatan kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. 9. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia & disiplin sosial. 10. Pengembangan sarana/prasarana kota dan kualitas lingkungan. | Program Utama DKI s.d. Tahun 2005 | 1985-2005 | Dana APBD DKI |
| 11. | BAPPEDA DT I JARAR | Adanya keselarasan pembangunan sektoral dengan Pembangunan Daerah, Program diarahkan kepada kebijakan tata ruang pada setiap wilayah pembangunan yang menyangkut fungsi, penggunaan dan hirarki perkotaan dan faktor-faktor pendukungnya. Ada 7 WP yang diprogramkan yaitu : | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1. WP Banten :
 - kawasan industri
 - pengembangan lahan basah
 - pengembangan pariwisata
 - pengembangan pertanian dan pemanfaatan lahan kering
 2. WP Botabek
 - sebagai penyangga (menampung kegiatan dari DKI Jaya)
 - kegiatan-kegiatan hijauan dan buah-buahan
 3. WP Sukahumi
 - Di jadikan sebagai WP yang berfungsi pengembangan wilayah Botabek sebagai WP pariwisata dan pertanian.
 4. WP Purwasuka
 - Pertanian (lumbung padi di Jahar)
 - Pengembangan usaha perkebunan, perikanan dan sentra industri kecil/dan kerajinan rakyat.
 5. WP Bandung
 6. WP Cirebon
 - Pusat Industri dan perdagangan serta pengembangan pertanian
 - Transportasi
 7. WP Priatin
 - Lahan kering
 - Industri kerajinan
 - Perkebunan, pariwisata & pertanian lahan basah
-

BAGIAN B
SAMBUTAN-SAMBUTAN

**SAMBUTAN KETUA LPM
DALAM RAPAT KERJA LEMBAGA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT IPB**

=====

Yang saya hormati:

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. H. Sitanala Arsyad
Pembantu Rektor I IPB, Prof. Dr. Ir. H. Sadan Widarmana
Teman sejawat dari Departemen Dalam Negeri,
Departemen Pertanian,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, baik Tk. I
maupun Tk. II
Para Pimpinan Fakultas, Pembantu Dekan I, Lembaga
Penelitian, Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI), Pusat Antar
Universitas, Staf LPM, dan Hadirin yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa pada hari ini dan Insya Allah sampai besok kita akan mengadakan Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB. Selamat datang kepada seluruh peserta Rapat Kerja dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di dalam Rapat ini.

Hadirin yang saya hormati,

Setelah tiga tahun dilaksanakannya program-program pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB adalah sangat wajar untuk diadakan evaluasi menyeluruh. Rapat kerja ini diadakan bukanlah untuk menyetengahkan kepuasan-kepuasan yang telah dicapai melalui koordinasi LPM-IPB. Kita berharap di dalam Rapat Kerja ini akan diinformasikan apa saja kegiatan atau program yang telah dilakukan, seberapa jauh hasil dan dampaknya bagi khalayak sasaran, kendala-kendala dan tantangan-tantangan di masa depan untuk tiga tahun yang akan datang. Hal ini terkait dengan adanya kondisi logis di masyarakat yaitu transformasi sosial ekonomi, dan seberapa jauh IPB mampu mengantisipasinya.

Di samping itu, tema rapat kerja ini terkait erat dengan adanya perubahan struktur di dalam sistem pendidikan, dengan munculnya Undang-Undang RI No. 2/tahun 1989 yang diterjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional, yaitu Peraturan Pemerintah No. 30/tahun 1990.

Hadirin yang saya hormati,

Secara singkat, selama tiga tahun Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) telah menerapkan strategi dasar yang menyangkut konsolidasi, integrasi dan pengembangan program.

Konsolidasi yang telah dilakukan oleh LPM IPB menyangkut konsolidasi ke dalam dan keluar, termasuk di dalamnya upaya mengukuhkan sendi-sendi keorganisasian, termasuk sosialisasi PPM di lingkungan IPB (Konsolidasi ke dalam). Sedangkan Konsolidasi ke luar telah diupayakan untuk mencoba melakukan hubungan kerjasama yang intensif dan solid dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Kemudian strategi dasar kedua adalah strategi Integrasi, dimana Program PPM banyak didasarkan pada program Institut Pertanian Bogor. Begitu juga integrasi ini bukan berarti hanya diintegrasikan dengan program-program di tingkat IPB saja, tetapi juga dengan program-program yang ada di Fakultas, Lembaga Penelitian, LSI dan unit-unit yang lainnya.

Strategi dasar yang ketiga adalah Pengembangan Program. Selama ini kami mencoba menerapkan pendekatan pengembangan lebih menonjol ketimbang pendekatan rutin. Dengan perkataan lain bahwa pengembangan program dikaitkan kepada upaya menciptakan adanya permintaan-permintaan dari pihak luar IPB.

Karena itulah selama tiga tahun, alhamdulillah, baik ditinjau dari dimensi jumlah kegiatan, dari jumlah staf yang terlibat, dan juga dari jumlah biaya ada kecenderungan semakin meningkat. Namun demikian peningkatan dalam jumlah kegiatan, jumlah staf dan jumlah biaya, dinilai belum masuk pada "daerah" yang optimal, mengingat adanya kendala-kendala yang dihadapinya. Apakah itu kendala yang menyangkut ketersediaan biaya, waktu, staf dan juga faktor-faktor non teknis lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam Rapat Kerja ini, keterlibatan unit-unit organisasi, baik di IPB dan juga luar IPB serta teman-teman yang pernah menjadi Kepala Biro dan Ketua LPM di lingkungan IPB sangat kami harapkan, guna memberikan masukan-masukan yang berharga. Masukan-masukan ini tentunya akan terkait kepada upaya meningkatkan koordinasi, integrasi dan juga sinkronisasi. Pada gilirannya sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan akan semakin meningkat dan juga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semakin berkembang.

Harapan kami dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana kita mencoba menjawab berbagai masalah yaitu: (1) apa saja orientasi program Pengabdian kepada Masyarakat yang perlu diterangkan dikemudian hari (2) skala dari Pengabdian kepada Masyarakat itu, (3) rumusan-rumusan atau agenda apa saja dan program pokok serta strategi dasar yang bagaimana yang bisa kita rumuskan, dan (4) apa sistem keorganisasian serta koordinasi program yang efisien dan efektif.

Hal yang kami sebutkan terakhir kami anggap penting, mengingat bahwa di dalam PP No. 30/tahun 1990, dengan ditiadakannya istilah pusat di dalam Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, seharusnya mengundang kreativitas dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjawab hal itu. Karena itulah, di dalam statuta IPB kami telah mengusulkan adanya perubahan-perubahan nama untuk pusat/unit-unit program. Ada dua unit program yang kami anggap penting untuk diubah namanya. Pertama, adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (P2M) diubah namanya menjadi Unit/Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia. Sedangkan kedua, Pusat Pelayanan kepada Masyarakat (P3M) kami modifikasi menjadi Pusat Pelayanan Informasi Teknologi.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB beserta staf dan Pimpinan Fakultas, Pemerintah Daerah, dan Departemen-departemen yang terkait, Lembaga Penelitian, Lembaga Sumberdaya Informasi, Pusat Antar Universitas (PAU), dan rekan-rekan di lingkungan LPM atas kerjasamanya selama ini. Di sisi lain, keberhasilan dari Rapat Kerja ini tidak luput dari kerja keras panitia. Untuk itu diucapkan penghargaan dan terimakasih.

Billahit taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Ketua
Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat IPB,

Dr. Ir. H. SJAFRI MANGKUPRAWIRA

PENGARAHAN REKTOR IPB PADA PEMBUKAAN BAKER
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Assalamu'alaikum wr. wbr.

Yth. Saudara Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat beserta Staf.

Yth. Bapak-bapak dari Instansi Dinas Pemerintahan di Luar IPB, serta Saudara-saudara para staf Pengajar dan Pimpinan Fakultas di lingkungan IPB.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk mengikuti rapat kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IPB. Beberapa bulan yang lalu di IPB juga sudah diselenggarakan Rapat Kerja Lembaga Penelitian IPB.

Saudara-saudara sekalian !

Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang telah menyelenggarakan rapat kerja ini. Dan saya pandang rapat kerja ini penting sekali, mengingat beberapa hal. Pertama, dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan baru, khususnya UU No. 2/tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian untuk pelaksanaannya dengan adanya PP No. 30/tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dan usaha-usaha yang telah dilakukan IPB untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerjanya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru tersebut, telah kita lakukan selama hampir setahun.

Oleh karena itu, saya kira, sudah sewajarnya Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan Rapat Kerja ini. Selain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan yang baru, rapat kerja ini juga dapat digunakan untuk melihat kembali apa yang telah dihasilkan ? serta apa hambatan-hambatan yang dialami selama tiga tahun terakhir ?

Hadirin sekalian !

Kita sama-sama mengetahui, bahwa pengertian pengabdian kepada masyarakat (PM) masih tetap sama, yaitu pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan

menuju tercapainya manusia Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Itu adalah kerangka dasar dari pada pemikiran, pengertian dan merupakan landasan kerja pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi.

Hadirin sekalian !

Pelaksanaan PM itu juga merupakan salah satu tugas pokok yang tidak terpisahkan dari Tridarma Pendidikan Tinggi dari suatu perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga darma ini merupakan tiga darma yang saling berkait dan saling menunjang bagi suatu lembaga pendidikan tinggi. Tentunya kalau dengan sistem pendidikan nasional saat ini, dengan PP Nomor 30/tahun 1990, ada juga klasifikasi lembaga pendidikan tinggi yang tidak menganut tridarma, yaitu yang melaksanakan program-program diploma, dimana darma utamanya pendidikan, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memperoleh porsi kecil sekali.

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang namanya Institut yang sejajar dengan Universitas, IPB mempunyai tridarma itu dan harus melaksanakan ketiga darma tersebut dalam proporsi yang sewajarnya dan merupakan suatu bagian yang terintegrasi. Tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling menunjang. Pendidikan tanpa didukung oleh penelitian yang baik dan mendapatkan input atau pengalaman dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak juga akan mampu meningkatkan program perguruan tinggi yang baik, yang betul-betul berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat (PM) harus dilihat sebagai salah satu dari tridarma, yang tidak dapat dipisahkan/ditinggalkan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut perlu dilakukan dan didukung oleh segenap warga perguruan tinggi dengan pengertian yang cukup tentang konsep pengabdian kepada masyarakat dan metoda-metoda pelaksanaannya.

Kemudian kita harus melihat kepada siapa pengabdian kepada masyarakat (PM) ini harus dilakukan. Kita melihat sasaran/kelompok sasaran kegiatan PM pada umumnya juga masih sama, yaitu masyarakat di luar kampus perguruan tinggi itu sendiri yang sudah tidak lagi terjangkau atau tercakup oleh program pendidikan formal. Kelompok sasaran itu dapat berupa perorangan, kelompok, organisasi pemerintah atau swasta, atau suatu komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, maka sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dan memfokuskan diri dalam bidang pertanian (dalam arti luas) haruslah memiliki cakupan masyarakat sasaran yang beragam.

Dalam pengertian bidang pertanian dalam arti luas, bukan saja luas dalam sektor, yaitu pertanian arti sempit, kehutanan, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, teknologi pertanian; dalam artian sektor. Tetapi juga dalam arti luas mencakup seluruh spektrum dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Kita tahu bahwa dalam sistem pertanian dapat dibagi dalam sistem produksi termasuk pengolahan sumberdaya, tanah, air dan manusianya. Kemudian dalam sistem pasca panen, yaitu pengolahan hasilnya termasuk pengertian industri pertanian; dan dalam sistem pemasarannya. Kalau sistem pertanian ini dilepaskan dari aspek industrinya, maka suatu pertanian itu tidak akan dapat berkembang dengan semestinya.

Oleh karena itu suatu sistem pertanian akan lebih berkembang jika sistem pertanian itu dilihat mulai dari sistem pengelolaan sumberdaya, sistem produksinya, pengolahan hasil (dalam pengertian industri pertanian, yaitu industri yang berkaitan dengan hasil dan kebutuhan pertaniannya), serta pemasaran dari pada komoditi pertanian dan komoditi industri pertanian. Cakupan program pengabdian itu seharusnya juga mencakup seluruh aspek masyarakat, mulai dari masyarakat tani, yang bergelut dengan produksi primernya. Masyarakat tani ini haruslah dapat ditingkatkan kemampuannya dalam sistem pengelolaan industri pertanian, pemasaran dan sebagainya.

Saudara-saudara sekalian !

Dengan demikian maka skope daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, apalagi menghadapi masa-masa mendatang dengan globalisasi ekonomi, tidak hanya terbatas di masyarakat-masyarakat pedesaan yang berorientasi hanya untuk meningkatkan keterampilan berproduksinya. Akan tetapi skope atau jangkauan pengabdian itu harus lebih luas. Petani di pedesaan itu harus pula diajak berfikir dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan setelah produksi, pasca panen termasuk industri pertaniannya.

Hadirin sekalian !

Saya rasa pada akhir-akhir ini juga banyak dibahas mengenai pembangunan masyarakat desa. Terutama setelah Menteri Muda Pertanian mengungkapkan bagaimana sentuhan dari industri pertanian di dalam mengangkat masyarakat desa, belum banyak hasilnya. Pada pagi ini di surat kabar KOMPAS dibahas bahwa agroindustri belum mampu mengangkat kemampuan atau derajat dan kesejahteraan petani. Ini merupakan suatu tantangan yang besar bagi kita, khususnya dalam sistem pengabdian kepada masyarakat IPB. Sampai dimana unsur pengabdian ini menerapkan, menyampaikan atau mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan dalam segala aspek kegiatan kepada masyarakat petani di pedesaan.

Seperti saya katakan juga, bahwa kita tidak terpaku di situ saja. Cakupan daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu haruslah lebih luas. Tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di daerah-daerah perkotaan dengan aspek industri pertaniannya. Masalah-masalah lingkungan juga harus merupakan cakupan daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB. Terutama khususnya dengan usaha-usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, untuk melestarikan sumberdaya dan lingkungan hidup yang telah merupakan program yang semakin penting bagi negara kita dan di dunia.

Selain daripada itu, setelah sekian lama kita seolah-olah melihat pengabdian kepada masyarakat hanya di dalam negeri, maka saat ini saya rasa jajaran Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB harus juga sudah melihat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke luar batas-batas negara Republik Indonesia, khususnya negara-negara Asia Tenggara dan Asia pada umumnya, dimana mereka pada saat-saat ini sudah mulai melirik dan menggugah kita untuk dapat menunjukkan atau mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang mungkin sangat diperlukan oleh masyarakat di luar Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan di luar Indonesia ini sebenarnya sudah secara sporadis dilakukan oleh IPB di tahun-tahun yang lalu, yaitu oleh Fakultas-Fakultas tertentu dalam beberapa aspek. Harapan saya untuk masa mendatang masalah ini akan merupakan suatu hal yang perlu perhatian lebih besar, sehingga dapat digarap dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara sekalian !

Kesemua ini tentunya menuntut kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya. Terutama tentunya di lingkungan IPB, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus lebih terintegrasi. Untuk itu kita harapkan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dapat merupakan Koordinator dan pendorong bagi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB yang dilakukan oleh berbagai unit. LPM harus mampu menunjukkan dan mengarahkan bagaimana kegiatan-kegiatan program pengabdian kepada masyarakat oleh beberapa unit itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuknya. Mungkin kepada masyarakat yang lebih luas, maka bentuk pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat juga dalam bentuk Buletin Informasi.

Kalau di Lembaga Penelitian dalam aspek penelitian kita sudah mempunyai dua media yang baik, yaitu Indonesia Journal for Tropical Agriculture, yang merupakan jendela penelitian IPB untuk dunia internasional dan kini sudah masuk tahun ketiga. Tahun ini kita mulai menerbitkan majalah Ilmu Pertanian dalam bahasa Indonesia, yang kita harapkan menjadi media Nasional dalam informasi perkembangan-perkembangan Ilmu Pengetahuan Baru sebagai hasil dari penelitian-penelitian pertanian di Indonesia.

Dengan dua media ini, saya rasa dari segi publikasi aspek penelitian sudah cukup. Pertama "Indonesian Journal for Tropical Agriculture", yang khusus ditujukan sebagai jendela Ilmu Pengetahuan Pertanian Indonesia ke luar negeri. Sekarang media ini sudah merupakan bahan pertukaran-pertukaran informasi dengan berbagai pihak di luar negeri yang sudah meliputi hampir 50 lokasi/lembaga dan jumlah eksemplarnya sudah meningkat dari sekitar 400 menjadi 500 eksemplar setiap kali terbit. Kedua journal Ilmu Pengetahuan Indonesia, kita harapkan akan dapat dijadikan Journal Ilmiah Standar bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Pertanian di Indonesia.

Saudara-saudara sekalian !

Klaim yang kita buat yang menyatakan bahwa Indonesian Journal for Tropical Agriculture adalah jendela Ilmu Pengetahuan Pertanian Indonesia ke luar negeri. Itu tentunya harus diikuti dengan kemampuan penelitian dan kemampuan pembinaan journal tersebut. Demikian juga Journal Ilmu Pengetahuan Pertanian dalam negeri menuntut kemampuan staf dari Lembaga tersebut untuk membina kontinuitas terbitan journal tersebut.

Oleh karena itu saya kira adalah sudah sewajarnya jika Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat juga sudah mampu menerbitkan buletin informasi. Seharusnya tidak boleh kalah dari majalah TRUBUS. Ini adalah suatu tantangan tentunya. Malah banyak yang mengatakan kenapa IPB tidak bisa melakukan kegiatan seperti penataran yang dilakukan oleh kelompok KRISTIANTO WIBISONO, atau kelompok-kelompok di Jakarta lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan, pengumpulan dan penyajian informasi yang kuat.

Saudara-saudara sekalian!

Selain hal-hal di atas, tentunya sebagai bendera dan ciri dari kegiatan pengabdian itu adalah Buletin Informasi. Kemudian program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, apakah itu untuk penyuluhan, penataran teknologi, atau sekarang mungkin masalah manajemen pertanian. Kesemuanya itu harus mendapatkan porsi yang lebih besar untuk didiseminasikan kepada masyarakat di sekitar kita, yaitu masyarakat yang lebih luas atau masyarakat pertanian maupun instansi.

Saudara-saudara sekalian!

Kesemuanya ini menuntut seluruh jajaran Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk melihat dirinya dan mengembangkan dirinya agar mampu mengemban tugas tadi. Saya yakin dari pengalaman yang baik dan kurang baik, seluruh jajaran Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan juga sumberdaya yang di luar LPM (PM-PM yang ada

di jurusan dan fakultas-fakultas) tentunya dapat dikerahkan untuk mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat Institut Pertanian Bogor di masa yang akan datang. Dimana corak dan intensitasnya sudah harus lain dan lebih baik dari yang lalu.

Saudara-saudara sekalian!

Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak-bapak dari dinas instansi pemerintah di luar IPB yang terus hadir dalam pertemuan ini, dan yang selama ini telah mengadakan kerjasama terutama kabupaten-kabupaten kerjasama, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) dan Pembangunan Desa (BANGDES), serta instansi lain yang telah bekerjasama dengan IPB.

Saya rasa dengan kerjasama yang akan datang, maka tugas-tugas kita di dalam upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia di masa mendatang akan lebih dapat memberikan hasil, dan akan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita sendiri karena dapat memberikan sumbangan-sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan negara kita.

Sekian sambutan saya, maka dengan ini "Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada masyarakat Institut Pertanian Bogor dengan resmi dibuka".

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Bogor, 7 Mei 1991

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Sitanala Arsyad

**SAMBUTAN PR I IPB
PADA PENUTUPAN RAPAT KERJA LPM IPB**

=====

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian.

Kita patut menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan karuniaNya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja ini sampai kepada saat akhirnya. Juga kita ucapkan rasa syukur atas kesabaran Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang hadir sampai detik-detik terakhir.

Kita dalam rapat kerja ini pada mulanya terutama mengharapkan masukan untuk hal-hal seperti: Koordinasi dan Organisasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), mekanisme kerja, program-program dan strategi LPM, Program-program Pengabdian kepada Masyarakat (PM) Fakultas-fakultas dan unit-unit lainnya, peningkatan peran IPB di dalam kerjasama dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah dan sebagainya. Ternyata dari tanggapan yang disampaikan dalam makalah-makalah maupun dalam diskusi, kita bahkan mendapat masukan-masukan yang melibatkan darma-darma lainnya, seperti pendidikan dan penelitian. Banyak di antara masukan itu yang kami anggap merupakan tantangan, bukan saja bagi LPM, tetapi bagi keseluruhan IPB. Merupakan "pekerjaan rumah" bagi pimpinan IPB untuk menjabarkan dan mencoba merealisasikan usulan-usulan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari kalangan IPB sendiri maupun dari luar IPB.

Misalnya saja kami mendengar di dalam diskusi ini ada masukan yang sebenarnya perlu ditanggapi oleh LPM tidak hanya "kalau ada anggarannya". Contohnya, seperti apa yang ditanyakan oleh Pemuda Karawang "bagaimana kita bisa mempertahankan Karawang sebagai gudang beras Jawa Barat". Saya kira hal-hal seperti ini tidak hanya ditanggapi oleh LPM, tetapi semua masukan ini dapat kita catat, oleh semua jajaran IPB untuk dijadikan paling tidak topik-topik penelitian, mungkin penelitian S1, S2 dan S3. Saya kira hal ini sangat besar manfaatnya, dan biayanya bisa dicarikan, entah dari mana.

Hadirin sekalian !

Dengan selesainya rapat kerja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta yang tulus dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terutama yang berseragam dan bersafari. Kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian saya ucapkan selamat kembali ke tempat masing-masing tanpa halangan apa-apa dan kami yakin bahwa masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi IPB, di dalam usaha

meningkatkan peran IPB dalam pembangunan. Kami yakin, bahwa kita dengan bantuan Bapak-bapak sekalin akan dapat berusaha untuk selalu mengambil langkah-langkah dan rencana-rencana yang nyata, agar IPB dapat berperan nyata, bukan saja pada lingkungan nasional, tetapi juga internasional.

Dengan demikian pada kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan IPB, saya menyatakan "Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang berlangsung dua hari, dengan ini dinyatakan ditutup secara resmi". Sekian !

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor
Pembantu Rektor I IPB.

Prof. Dr. Ir. H. SADAN WIDARMANA

BAGIAN C
MAKALAH & NOTULEN DISKUSI

NOTULEN DISKUSI SESSION I

- Pemrasaran : 1. Dr.Ir. Siafri Mangkuprawira
 2. Prof.Dr.Ir. Sedan Widarmana
 Ketua Sidang : Dr.Ir. Surdiding Buhendi, M.Sc
 Sekretaris Sidang : Ir. Lina Karliyenna, MS
 Penyampaian makalah : Lihat makalah RLPm-I, II dan III

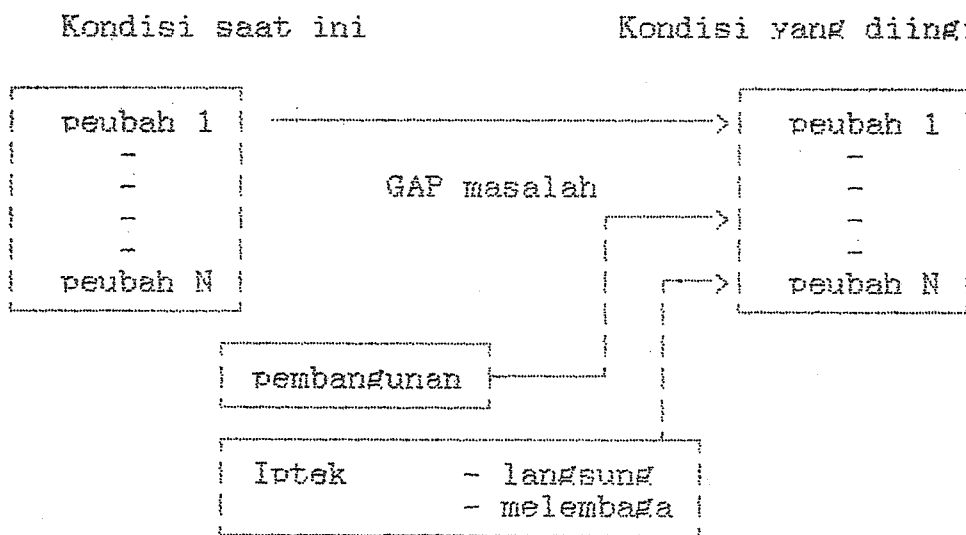
Diskusi :

I. Pertanyaan dari Bappeda Kabupaten Bogor

- a. Program LPM di Kabupaten Bogor sudah cukup jelas terutama untuk program pemanfaatan lahan kering. Bappeda mencoba memanfaatkan lahan sempit yang ada di depan kantor Bappeda. Ditanami jagung hibrida dengan modal Rp 250.000,00, tetapi setelah dipasarkan hanya dapat setengahnya. Bagaimana LPM IPB dapat memotivasi masyarakat supaya mau memanfaatkan lahan sempit.
- b. Proyek Tapos pada awal-awal proyek dirasakan manfaatnya, tetapi kini dirasakan kurang adanya monitoring, juga untuk proyek Parungpanjang. Di Parungpanjang seyogyanya tidak hanya pertanian saja tetapi juga air bersih.
- c. Bagaimana koordinasi PPM dengan dekan-dekan, pada Bagian 1, seolah-olah Fakultas yang ada lebih rendah dari LPM.

Jawaban

1) Kegiatan PPM pada dasarnya dapat digambarkan seperti berikut :



asumsi tertentu

Untuk melakukan PPM individu dibekali dahulu, setelah menguasai teknologi maka baru diterjunkan ke masyarakat. Teknologi di PT tidak akan sama hasilnya dengan di lapangan. Kami perlu masukan dari pemakai seperti yang dilaporkan oleh Bappeda Bogor agar dapat dilakukan perbaikan.

- 2) Untuk Tapos, tahun ini LPM ada dana untuk pengembangan dan pengelolaan padang penggembalaan, hal ini dilakukan sesuai dengan adanya perkembangan populasi ternak domba bantuan Rektor IPB pada masa lalu.
- 3) Mengenai air bersih, maka akan dikaitkan dengan instansi lain.
- 4) Sesuai dengan PP no. 30/1990, LPM merupakan unsur pelaksana di bawah rektorat, dimana kedudukan LPM sebenarnya sejajar dengan Fakultas-Fakultas. Dalam kegiatan tertentu yakni kegiatan PPM, LPM ditugasi untuk mengkoordinasikan kegiatan PPM (Bagan 1). Permintaan masyarakat kepada Rektor yang berhubungan dengan PPM akan dilimpahkan ke LPM. Jika kegiatan bersifat monodisiplin, maka oleh LPM lalu dilimpahkan ke Fakultas/Jurusan yang relevan, tetapi jika kegiatan bersifat interdisipliner maka diarahkan ke pusat-pusat yang ada di LPM yang kemudian pusat ini akan bekerjasama dengan Fakultas-fakultas yang terkait, lalu LPM meleghalisasi kegiatan PPM tersebut.
- 5) Diakui bahwa tingkat keprofesian mahasiswa masih belum matang, seyogyanya pembinaan lanjutan dilakukan oleh dinas-dinas teknis. Harus diingat bahwa IPB tidak ingin masyarakat tergantung terus-menerus, hal ini agar masyarakat bisa mandiri mengembangkan dirinya sendiri. Mungkin istilahnya bukan masyarakat binaan IPB tetapi masyarakat mitra kerja IPB.

II. Saran-saran dari seseorang PPM yaitu Bapak Ir. Gelar

- Kelanjutan suatu program memang sangat penting, salah satu cara pembinaan berkesinambungan adalah dengan membina tim lokal yang bertugas melanjutkan pembinaan selanjutnya, tim ini akan bertanggungjawab dalam pengembangan program secara terus menerus di lokasinya karena tim lokal ini akan ada terus di tempatnya. Jadi jangan hanya membina masyarakat sasaran, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan harus membina tim lokal.
- Suatu proyek PPM seyogyanya merupakan proyek yang tuntas dalam arti tidak hanya menyiapkan sarana produksi, teknologi, produksi melainkan juga harus menangani pemasarannya. Hal ini dikemukakan karena pengalaman pengembangan produksi perikanan di Saguling.
- Untuk intern IPB terlihat masih sulit untuk mendayagunakan ahli-ahli/pakar-pakar yang ada di Jurusan/Fakultas dalam

program-program PPM. Wakil Fakultas di LPM seyogyanya dapat merekrut ahli-ahli di Fakultasnya untuk ikut dalam program-program PPM.

Jawaban

Pada kenyataannya seorang staf sudah sangat berat bebannya yakni lebih dari 12 SKS, dan ada di Fakultas sehingga dekan lebih berkuasa. Memang perlu dipikirkan bagaimana seharusnya, bagaimana proporsinya supaya ketiga darma perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara seimbang. Juga diharapkan bagaimana saran-saran dari instansi-instansi daerah.

III. Pertanyaan Badan Diklat Pertanian

- Menurut Bagan 1 pada makalah 3 ada sistem koordinasi ke dalam IPB di tingkat Rektor. Bagaimana tata kerja dan tata hubungan kerja dengan instansi di luar IPB dalam kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pengembangan wilayah sehingga ada sinkronisasi, karena banyak paket-paket dari eselon satu (departemen) yang langsung diserahkan ke perguruan tinggi.
- Pada makalah 2 kenapa program-program yang berkaitan dengan gizi dan kemiskinan tidak muncul? Dan bagaimana IPB sebagai bagian dari pendidikan nasional berinteraksi dengan Televisi Pendidikan Indonesia.

Jawaban

- Jika dilihat Bagan 1 pada makalah 3, sinkronisasi dengan interdepartemental sedang dipelajari.
- Masalah gizi dan kemiskinan sudah ditangani oleh salah satu pusat di Lembaga Penelitian sehingga LPM tidak khusus menanganinya.
- Biasanya masalah/isu nasional dijadikan thema dalam KKN, jadi sebenarnya LPM peduli pada masalah-masalah nasional yang sedang terjadi.

NOTULEN DISKUSI SESSION II

Pemrasaran : 1. Dr. Ir. Bambang Pramudya
 2. drh. Sunarya Prawiradisastra
 Ketua Sidang : Dr. Ir. Aida Vitaya S. Hubeis
 Sekretaris Sidang : drh. R. Supiganto
 Jam : 11.15 - 12.40

MAKALAH 10:

1. Pembinaan dan pengembangan industri kecil
 - * Kerjasama dengan Departemen Perindustri untuk membina sentra-sentra industri.
 - * Pemanfaatan mahasiswa, melalui program KKN, dengan menempatkan mahasiswa di desa-desa sentra industri.
 - * Pembinaan per sentra industri, dilakukan dengan minimum 3 tahun pembinaan, yaitu dengan menempatkan mahasiswa KKN berturut-turut selama periode tersebut.
2. Pembinaan tujuh desa lingkaran kampus
 - * Pembinaan keterampilan dan penerapan teknologi pertanian.
 - * Pengenalan teknologi tepatguna.
 - * Pembinaan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan himpunan profesi mahasiswa (HIMATEPA), HIMALOGIN dan HIMATEPA).
3. Program Pelatihan
 - * Materi pelatihan menyangkut aspek industri pengolahan hasil dan peralatan pertanian.
 - * Mitra kerjasama adalah Dept. pemerintah daerah, koperasi dan Biro-biro konsultan.

MAKALAH 4:

1. Klinik Satuan Tugas Hewan Keliling (KHK-FKH IPB), khususnya sapi perah rakyat mencakup aspek kesehatan ternak (produksi dan reproduksi)
2. Lokasi binaan adalah di daerah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi.
3. Pelaksanaan KHK dilakukan oleh staf pengajar FKH IPB, masih bersifat sporadis karena keterbatasan.
4. Pemanfaatan mahasiswa koasistensi ke berbagai wilayah sapi perah di Jawa Barat.

5. Pelatihan untuk petugas pelayanan teknis di lapangan (inseminator, paramedis, pemeriksa kebuntingan, asisten teknis produksi, kualitas kontrol); materi pelatihan disusun dalam bentuk modul.

Diskusi:

I. Dodi ---> Pak Bambang

- Hasil penelitian ---> bagaimana menerapkan ke masyarakat
- Pembuatan brosur-brosur sederhana ---> ke masyarakat (mungkin tidak)
- Kerjasama LPM ---> Fakultas (Komisinya ?)
Fakultas ---> bagaimana ? (PPM-nya)
- Peningkatan Status Korwil ?
Fakultas --->

II. Pallawarukka

- Kokurikelur + akademis --> peran kerjasama mahasiswa bersama-sama dalam pasca KKN/ desa mitra
- Keterlibatan dosen lebih nyata (terutama PR-nya)
--> Dana siapkan

III. Dana (Departemen Dalam Negeri)

- Apa yang perlu disampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat
- Mendorong perencanaan program-program 3 th (Bambang)
- Kendala dana ---> Pemda ikutsertakan
Pilih ----> masyarakat
----> pelaksana

IV. Pak Gelar

- * FKH = maksud + pengabdian per orang ?

- I. - Dr. Siafri
- Pak Juju
- Pak Gelar

- = PPM FKH ---> PPM Fapet = ? hambatannya
- = Ciri-ciri Program IPB (karena biaya dari IPB)
 - Koordinasi IPB + Daerah = kurang baik
 - Perlu penerangan LPM + Fakultas dalam pengabdian.
 - UDKP --> pengabdian sampai kecamatan (administrasi desa masih lengkap) karena pendanannya.
 - Cirebon + Sukabumi sudah ada anggaran di Pemda (APBN)
- = Perencanaan pengabdian masyarakat (jangan bertendensi pribadi)
 - > sebagai lembaga --> harus ada laporan
 - harus ada seminar
 - harus ada informasi apa saja jangan di-beritakan

- * Perlu koordinasi antara FKH + Fapet ---> dalam pengabdian masyarakat.
- * Kesimpulan : Perlu dana keluar ==> pengabdian secara bersama dengan bendera IPB.

- Fateta :

- * Transfer teknologi ke masyarakat, harus diperhatikan:
 - a. Hak paten, bagaimana ?
 - b. Siapa yang berhak mengadakan ?
 - c. Birokrasinya
- * inovasi-inovasi: sudah ada sebagian (KPM) pelatihan-pelatihan pengabdian
- * Pemilihan desa harap 3 tahun

- FKH

- Pada Pak Gelar pengabdian pribadi (harus melembaga)
 - * Pak sjafri (tambahan) jawaban *
- Komisi PPM ---> maksimal 15 % o staf boleh 0 %
- = menyangkut penghargaan pada pengabdian masyarakat belum seimbang seperti dana penelitian + pengajaran.
- = LPM mengusahakan upaya-upaya sosialisasi --> pasar terbuka (pengabdian akan tergeser).
 - o LPM mengadakan lokakarya ---> membentuk pedoman pokok ---> hambatannya (dana) diusahakan LPM dari masyarakat/pemerintah dengan susah payah.
- * Sasaran PPM ---> luas (masyarakat luas)
- * LPM perlu latihan pelatih khusus bagi fakultas-fakultas
- * Untuk informasi:
 - LPM mendukung membuat koleksi, distribusi, pelayanan informasi (LSI)--> sedang diaktifkan (ada yang baca).

KKN = Program 3 tahun ----> industri kecil
 Tahun I Pencarian masalah
 Tahun II Pemecahan
 Tahun III Evaluasi

Pengolah-pengolah KKN Fateta. Kerjasama dengan yang lainnya.
 Lingkaran Kampus. Teknologi tepatguna.
 Pelatihan-pelatihan Industri pengolahan Hasil pertanian
 Peralatan

1. Penyimpanan hasil pertanian (pengemasan)
2. Pendugaan tanggal (waktu, bentuk kemasan)
3. Optimasi sterilisasi pangan (waktunya)

Hasik Diskusi II:

- * Perlu dipikirkan cara menstransfer informasi dan kelembagaan di IPB yang bertanggung jawab. LPM IPB akan menangani hal ini di bawah koordinasi pusat pelayanan teknologi.
- * Komunikasi antar-komisi PPM di Fakultas perlu ditingkatkan sehingga saling tahu kegiatan yang dilakukan; begitu pula fungsi dan peran korwil PPM di kabupaten kerjasama dengan para komisi PPM di Fakultas perlu disinkronkan.
- * Program kerjasama PPM dengan mahasiswa himpunan profesi di IPB diarahkan pada penanganan pasca KKN dengan minimum waktu pembinaan tiga tahun untuk setiap lokasi binaan.
- * PPM dapat dilakukan oleh perorangan jika itu dikoordinasikan di bawah/sepengetahuan LPM IPB.
- * Koordinasi LPM IPB untuk mendorong warga kampus/staf pengajar memahami makna dan mekanisme PPM perlu didorong dan disemangati.
- * Pelaksanaan PPM, ke luar hendaknya memakai nama LPM IPB. Jadi yang ditonjolkan adalah IPB-nya. Pengaturan ke dalam diserahkan pada komisi PPM di Fakultas dan atau Jurusan. Sedangkan Lab/Studio tidak menyelenggarakan PPM atas nama Lab/Studio karena fungsinya hanya menangani urusan pendidikan saja.

NOTULEN DISKUSI SESSION III

Permasaran : 1. Dr.Ir. Kadarwan Soewardi
 2. Dr.Ir. Pallawarukka
 3. Dr.Ir. A.A. Mattiik
 Ketua Sidang : Ir. Ismail Pulungan, M.Sc.
 Sekretaris Sidang : Ir. M. Sjarif Hitam
 Jam : 13.30 - 15.15

MAKALAH 6:

Dalam engamalan Ilmu, harus diperhatikan:

1. Penguasaan Ilmu, oleh sumber
2. Ilmu dan pengujian di lapangan (untuk inovasinya)
3. Permintaan masyarakat, diperlukan masyarakat (need khalayak sasaran).
4. Ketersediaan dana

Permasalahan

1. Penurunan produksi budidaya udang
2. Pengelolaan pasca panen
3. Pemanfaatan perairan umum
4. Peningkatan efisiensi penangkapan perikanan pantai
5. Peningkatan kesejahteraan melalui pembinaan Koperasi atau sistem pemasaran
6. Konservasi sumberdaya

Program (sesuai acuan LPM)

- I. Kerjasama : sesuai makalah
- II. Pendidikan pada masyarakat : sesuai makalah
- III. Pelayanan pada masyarakat : sesuai makalah
- IV. Pembangunan dan Kaji Tindak : sesuai makalah

Pengelola/Komisi PPM Fakultas --> jadi Liason Offiser di LPM IPB

MAKALAH 7:

- Tawaran pemanfaatan "Jonghol" ----> JASTRU untuk kegiatan PPM
- Kurang banyak disiplin ilmu peternakan disampaikan kepada mahasiswa yang akan ber-KKN

MAKALAH 8:

FMIPA ----> 6 Jurusan
 Kegiatan Pelayanan masyarakat : sesuai dengan makalah
 Kegiatan Pelatihan

Kegiatan berkesinambungan ---> Laboratorium lapangan
 Jurusan : Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Fakultas : Komisi Pengabdian

Diskusi:

Gelar B.
 Hidayat Syarif
 Syafri Mangkuprawira
 Kuntjoro
 Roekasah Adiratma
 Harry

Gelar:

- * Budidaya ikan mas ---> terapung di Saguling dirasakan kekurangan anak ikan mas.
 Perlu ada usaha mensuplai benih cukup banyak dan pada waktunya.
 Varietas ikan mas ---> dimurnikan dengan cara cangkok sehingga ada bibit unggul
 Dicantumkan dalam program
- * IPB dengan Fapet ---> kerjasama dengan RRI dari pada menyiarkan dan memancarkan sendiri
- * Laboratorium lapangan: bentuk dan organisasinya

Hidayat Syarif:

- * Faperikan ---> koordinasi dengan LPM
- * Fapet -----> koordinasi perlu ditinjau lagi ?
- * Fmipa -----> pelayanan sudah banyak dilakukan kepada Departemen
 Data base dengan SEARCA: sudah berjalan 1 tahun
 --> berhenti!, mengapa?
 Sistem informasi di LPM ---> lemah?
- * Fasilitas Jonggol dapat dimanfaatkan --> bagaimana fasilitas yang tersedia itu dapat dimanfaatkan.

1. Syafri Mangkuprawira:

- * Aktivitas pengabdian dari Fakultas cukup baik
- * Usul Faperikan disambut baik ---> strukturnya belum jelas
- * Koordinator intern: - Rapat pimpinan ---> intensif
 - Rapat pengurus harian
 - Rapat pusat ---> (Kapus)
- * Koordinator ekstern: --> Lokakarya
 Usul Faperikan masih rumusan
- * Fakultas Peternakan: Koordinator kegiatan kemahasiswaan
 (PR III - PD III - LPM IPB)
- * Siaran Radio Peternakan: kurang efisien jika peternakan saja, sebaiknya dengan semua fakultas atau LSI!?

- * Laboratorium lapang: mampu dikembangkan oleh daerah setempat.
- * Meningkatkan motivasi staf ---> untuk staf pengajar IPB
- * Data base ---> untuk Commodity Development?
- * Rapi IPB ---> Pusat informasi dianggap penting
 - Akan dikoordinasikan dengan baik misalnya laporan KKN
 - Sayang dananya tinggi
- * Rektorat IPB: adalah pusat pendidikan berkelanjutan
- * Kongkrit: program ini akan diuji lebih nyata

2. Kuntoro:

- * Monodisiplin atau integrasi dengan Fakultas lainnya
- * Pengembangan perikanan air tawar belum ada? Misalnya mina padi
- * Tempat untuk komisi PPM Fakultas --> maksudnya keberadaan non fisik di LPM IPB, bagaimana?
 - Masalah: ketersediaan data dan penataan data potensi belum jelas di desa

3. Roekasah:

- * Kegiatan pengabdian di IPB --> sudah jauh lebih maju dibanding 25 tahun yang lalu, maju dalam kegiatan dan fisik
- * Tanpa uang jalan ---> bisa jalan?
- * Motivasi penting pada hal jalan sudah ada, jadi perlu dikembangkan ---> banyak staf di dinas yang diprogram untuk mengikuti latihan saja kerjanya karena begitu banyaknya latihan (spesialis pelatihan?).
- * Apa beda pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi dengan yang dilakukan instansi?
- * Harus ada ciri kegiatan PPM dengan kegiatan instansi agar terbina kerjasama yang baik.
- * Petani berdasar ---> komersial \square jadi: masing-masing khala-
Petani kecil ---> pengabdian \square yak ini memerlukan
strategi PPM yang ber-
beda .!
- * Apa yang akan disumbangkan IPB untuk masyarakat yang belum disumbangkan oleh staf.
- * Mengembangkan pola pembangunan selain Bimas
- * Makin banyak pembangunan ---> makin banyak padunya
- * Jonggol: lahan kering ---> Fateta \square
Fmipa \square program
Kehutanan | terpadu
Fapet \square

4. Harri: Bangdes

- * Program pengembangan masyarakat desa perlu diperhatikan lebih baik.
- * Bangdes sedang mengembangkan program terpadu

Jawab:

PDI FAPERIKAN:

- Usul perikanan: bukan fisik --> tapi psikologis
- Bibit --> ikan mas --> jaring apung disuplai
- Pengembangan perikanan darat ---> benih ikan ---> 100 buah dengan situ-situ di sekitar Bogor.
- Genetik bibit unggul ---> masih penelitian

PDI MIPA:

- Kontinuitas kegiatan kerjasama dengan Dati II belum jelas
- Dalam meninjau kerjasama yang telah ada menjadi lebih konkrit
- Ada pengabdian dalam arti luas ---> termasuk instansi
- SIM untuk perencanaan daerah akan diuji lebih konkrit
- Menurut PP 30 ---> 5 biro --->
 1. Biro Data dan Informasi
 2. Kemahasiswaan
 3. Keuangan
 4. BAAK
 5. Pengembangan

Hasil Diskusi III:

1. Agar LPM menyediakan tempat dalam struktur organisasi untuk Komisi Pengabdian Masyarakat Fakultas.
2. LPM IPB perlu merumuskan laboratorium lapang bagi kegiatan pengabdian masyarakat agar kegiatan tersebut berkesinambungan.
3. Perlu mengusulkan agar porsi pengabdian kepada masyarakat ikut menentukan sebagai KUM dalam kenaikan pangkat, sebagai dasar untuk memotivasi staf pengajar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tawaran Fapet untuk lebih memanfaatkan Jonggol sebagai pusat percontohan dan pusat latihan pengabdian masyarakat.
5. Sebagai khalayak sasaran pengabdian masyarakat dengan pengertian masyarakat dalam arti kata luas (bukan hanya masyarakat pedesaan saja).
6. Keikutsertaan mahasiswa perlu dikoordinasikan dengan unit-unit lain.

NOTULEN DISKUSI SESSION IV
=====

Pemrasaran : 1. Dr. Ir. Yaba Fakuara
2. Dr. Ir. Hidayat Syarief
Ketua Sidang : Prof. Dr. Ir. Sarsidi S.
Sekretaris Sidang : Dr. Ir. Dodi Nandika
Jam : 15.40 - 17.00

I. PENYAMPAIAN MAKALAH 9

Judul : Program Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kehutanan IPB 1991-1993

Materi :

1. Sasaran/pendekatan program :
 - a. Masyarakat menengah ke bawah, terutama yang tinggal di sekitar hutan.
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Program
 - a. Pelayanan Jasa
 - (1) Kursus Singkat, menyangkut :
 - a. Pembinaan hutan
 - b. Perencanaan hutan
 - c. Pengelolaan hutan Rakyat
 - d. Pemeliharaan bangunan
 - e. Penangkaran hidupan liar yang bernilai ekonomi.
 - (2) Penyediaan bahan :
 - a. Bahan bangunan
 - b. Bahan pengawet kayu/pestisida
 - b. Penyuluhan
 - (1) Uji Coba
 - a. Penangkaran kehidupan liar
 - b. Efisiensi pemanfaatan lahan melalui sistem agroforestry
 - (2) Perlombaan
 - a. Penataan halaman sekolah berwawasan lingkungan
 - b. Penyediaan, penyebaran bibit dan keberhasilan pembangunan hutan kota
3. Pelaksana : Civitas akademika & pihak-pihak lain yang dapat mendukung di bawah koordinasi Komisi PPM Fakultas Kehutanan IPB.



II. PENYAMPAIAN MAKALAH 10

Judul : Program Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, 1991-1993

Materi :

- (1) Tujuan umum program PPM-Faperta IPB adalah terciptanya kondisi yang mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui pengembangan sumberdaya manusia dengan kelembagaan.
Dalam konteks regional dan internasional, program PPM ditujukan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi regional dan internasional dalam rangka mewujudkan keragaan sistem pertanian yang lebih mantap secara global.
- (2) Tujuan khusus :
 - a. Membantu penyediaan tenaga profesional dalam bidang pertanian.
 - b. Menyediakan layanan informasi berupa penyuluhan/konsultasi.
 - c. Membantu meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pertanian.
 - e. Menciptakan iklim yang kondusif bagi para staf yang lebih terangsang melaksanakan kegiatan PPM.
- (3) Rancangan Program :
 - a. Pelatihan singkat (pertanaman, pengelolaan gulma, HPT, dan lain-lain).
 - b. Penyuluhan dan pelayanan jasa konsultasi.
 - c. Pelatihan regional/internasional.
 - d. Pengembangan desa mitra kerja
 - e. Penerbitan alat bantu pandang-dengar (audio visual aids)
- (4) Program PPM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran (pemerintah, LSM, swasta, dll) baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional).
- (5) Prinsip kelembagaan dalam penyelenggaraan PPM :
 - a. Jurusan dirangsang untuk menggalakkan PPM
 - b. Kerjasama antar jurusan digalang melalui penyelenggaraan program lintas disiplin.
 - c. Setiap penyelenggaraan PPM dilakukan secara melembaga melalui Fakultas di IPB.
 - d. Kegiatan PPM dilaksanakan dengan tetap mempertahankan keseimbangan kegiatan tridarma secara institusi.
 - e. Bagi kepentingan individu (staf pengajar) masih perlu dirumuskan sistem dan ketentuan-ketentuan yang kondusif agar staf pengajar lebih terangsang untuk melaksanakan kegiatan PPM (seperti Kuliah).

1. Apakah program PPM Fakultas IPB juga mencakup "model pengelolaan hutan", seperti TPTI, Agroforestry, HTI dan Hutan Kota.
2. Dalam mengkoordinasikan kegiatan PPM di Fakultas dan IPB, masih ada kendala-kendala khususnya dari segi peraturan (misalnya KUM untuk kegiatan PPM relatif sangat kecil). LPM pernah mengusulkan agar nilai KUM tersebut diubah menjadi 10-15.
3. Kurang sependapat jika kegiatan yang dapat/biasa dilakukan oleh pihak lain "dilepas" saja oleh IPB. Tetapi setuju harus komplementer dan "mengisi kekosongan."
4. Perlu dirumuskan program-program yang lebih profesional dengan jangkauan yang lebih strategis.

Ir. Gelar

1. Program pelayanan jasa dalam penyuluhan, pelestarian, kehidupan liar yang dilindungi/langka, misalnya : Koral di laut.
2. Apakah kehidupan liar yang langka termasuk yang ekonomis. Kalau Ya harus ada izin khusus dulu.
3. Penyuluhan dan pelayanan jasa merupakan pemanfaatan laut inforcement tentang perlindungan dan pelestarian hewan langka. Terlalu banyak orang yang memelihara satwa/hewan yang dilindungi. Perlu over pemitihan.

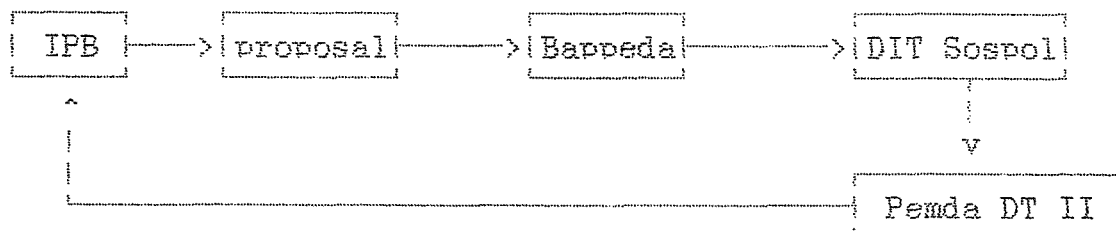
Eddem (Bappeda Jabar)

1. Mendukung perlunya koordinasi pelaksanaan PPM IPB.
2. Di Bappeda telah terbentuk "kelompok ahli" yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi.
3. Perlu ada dasar/pemberitahuan ke tingkat Departemen (Depdagri, Gubernur, Bupati) agar "partisipasi" dari daerah lebih mantap dan cepat.
4. Ada rencana rekrutmen ahli-ahli tanah dari IPB untuk memperkuat perencanaan di Bappeda tingkat daerah.
5. Bappeda I dengan Bappeda II perlu "dikaji"/mendapat informasi tentang seluruh kegiatan PPM.

Dr. Tantan

1. Mohon dukungan fakultas, apa KUM untuk kegiatan PPM mendapat KUM : 10 - 15.

2. Mohon bantuan agar tahun depan menawarkan program training untuk negara-negara tetangga. Siapkan silabus, materi, pengajar, dll (proposal) dan kirimkan ke LPM IPB.
3. Masalah KKN masih perlu disempurnakan.



- = harus tuntas poses persiapannya (izin, dll)
- = agar setelah selesai KKN, laporan KKN/penelitian perlu disampaikan ke Bappeda.
- =

Sanusi (Bangda)

1. Program-program LPM dapat disinkronkan dengan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun daerah sehingga lebih optimal hasilnya.
2. Ada baiknya jika sektor tidak memprogramkan sesuatu kegiatan, maka wadah ... di daerah dapat dilakukan (kecamatan, kabupaten, propinsi).

Bangun

1. Di level nasional (BAPPENAS) saat ini ada proyek Diversifikasi Pangan dan Gizi, dengan 17 pembagian di 17 Propinsi (9 diantaranya harus diserahkan/ditangani oleh Perguruan Tinggi). Nilai per proyek Rp 200-500 juta. Disamping itu ada juga "Evaluasi Pelaksanaan Program" yang menyangkut kemiskinan, yaitu :
 - a. Pangan non beras
 - b. Peningkatan mutu makanan
 - c. Teknologi sederhana
 - d. Peningkatan pendapatan masyarakat
 Proyek tersebut selayaknya dikejar oleh IPB
2. Mengapa pengembangan lebah madu tidak masuk program Fakultas Kehutanan, IPB ?

NOTULEN DISKUSI SESSION V

=====

Pemrsaran : 1. Dr. Ir. Lutfi I. Nasoetion
 2. Dr. Ir. Hidayat Syarief
 Ketua Sidang : Dr. Ir. Rizal Syarief
 Sekretaris Sidang : Ir. Astiana, MSc
 Jam : 08.30 - 10.15

Makalah XI: Dr. Ir. Lutfi I. Nasoetion

Tepat guna: adanya introduksi bobot nilai pada teknologi yaitu norma-norma

Teknologi : pengetahuan

Teknik : pengetahuan dan kepandaian

Teknologi bermula dari persepsi manusia terhadap masalah-masalah yang dihadapinya ---> menciptakan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan pengorganisasian ---> tata nilai dan norma-norma suatu proses yang siklik (historis materialism).

Hayami dan Ruttan: Teknologi suatu fenomena ekonomi peningkatan harga sumberdaya ---> mendorong terciptanya teknologi (dipengaruhi oleh mekanisme pasar).

Ratio lahan/manusia ---> kecil. Harga lahan lebih besar daripada tenaga kerja ---> berkembang teknologi yang cirinya menghemat lahan: pemupukan dan lain-lain. Sebaliknya di Amerika Serikat ratio lahan/manusia ---> besar ---> tenaga kerja mahal berkembang teknologi mensubstitusi tenaga kerja.

Kemampuan manusia mengembangkan teknologi tidak merata ---> timbul sistem ketergantungan global. Akibatnya timbul masalah alih teknologi ---> teknologi tepat guna.

Di Indonesia ---> pengembangan teknologi pertanian. Introduksi huller & silo pada akhirnya memberikan dampak negatif ---> menyinkirkan tenaga kerja (belum tepat guna). Introduksi teknologi ---> dapat memperburuk pendapatan.

Teknologi Tepat Guna : ada 10 point kriteria (dalam teks makalah)

Teknologi Tepat Guna bersifat relatif ---> kemampuan rendah ---> teknologi sederhana. kemampuan tinggi ---> teknologi tinggi pula.

Lembaga Penelitian harus diadaptasikan. Penciptaan pengalihan harus dengan perencanaan yang seksama ---> Base line study dan lain-lain (5 point dalam teks) ---> tahapan operasional untuk pengalihan teknologi tepat guna.

Diskusi:

1. Syafri Mangkuprawira: Sependapat bahwa penerapan teknologi harus memenuhi kriteria yang 10, dan harus dengan perencanaan yang hati-hati. Bagaimana mengenai teknologi tepat guna yang walaupun dekat dengan si miskin tapi tidak anti si kaya. Bagaimana teknologi mampu mengubah masyarakat. Teknologi sosial ---> yang dapat merakit motivasi masyarakat, apakah sama dengan Rekayasa Sosial.
2. Kadarwan: Penerapan konsep teknologi tepat guna ---> contoh dalam pertambahan ---> intensif (teknologi tinggi dengan persyaratan tertentu) disamping itu ada juga teknologi sederhana ---> ternyata di masyarakat tidak ada batas yang jelas. Persyaratan ternyata bukan hanya pada teknologinya tapi juga kondisi/lingkungan dimana teknologi ini diterapkan.

Jawab:

1. Adanya teknologi yang mengalami maldistribution ---> jelas memang ada ---> misalnya subsidi minyak tanah ---> mengurangi konsumsi kayu tapi substitusi ini menyebabkan teknologi alternatif sangat terhambat/terbatas misalnya biogas dan lain-lain karena masih lebih murah minyak tanah. Dalam jangka panjang ini akan menyebabkan teknologi untuk energi ---> tidak berkembang dan tidak siap. Dalam jangka pendek menguntungkan, jangka panjang merugikan.

Teknologi yang dapat dimanfaatkan orang miskin tapi tidak anti si kaya.

Teknologi varietas-varietas baru dari padi (highly divisible) dapat dipergunakan untuk semua lapisan masyarakat. Netral terhadap besaran usahatani. Masalahnya ---> bagaimana meningkatkan efisiensi agar teknologi tersebut murah, supaya dapat dimanfaatkan golongan bawah.

Perakitan teknologi ---> rekayasa sosial merupakan faktor yang menentukan dalam menghasilkan teknologi. Baik organisasi dan aturan permainan. Perlu dipahami oleh LPM.

Rekayasa sosial di Sagaranten telah berkembang dengan cukup baik. Apakah mungkin melakukan rekayasa sosial agar masyarakat self propelling.

Apakah norma-norma (yang 10) dapat diuji coba di LPM agar dapat dimanfaatkan sebagai seleksi terhadap teknologi tepat guna.

- PAU masih proyek, belum ada bentuk kelembagaannya yang pasti dari IPB, belum dikaitkan pada suatu struktur kelembagaan.
- Perlu peninjauan dana LPM dari Dikti yang selama ini sangat kecil. LPM harus juga dapat mengajukan teknologi apa yang secara riil diperlukan masyarakat.

- Perlu dibentuk joint organization antara LSI - LP - LPM untuk lebih menselaraskan langkah-langkah terutama dalam program.
- 2. Struktur perlembagaan budaya masyarakat sangat menentukan alih teknologi. Ada cultural Gap dalam mengadaptasi teknologi. Norma/tata nilai tidak berkembang secara paralel. Teknologi canggih dan sederhana dapat diterakan serempak asal melihat segmen-segmen yang ada. Tidak boleh memaksakan suatu perubahan terhadap perubahan bersifat spesifik secara lokal.

Makalah XII: PAU (Pusat Antar Universitas)
Dr. Ir. Hidayat Syafief

Adanya ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju di utara (teknologi import), malahan bukan diadaptasikan tapi lisensi dan bahan-bahan/ahli dipasok dari luar. Untuk menjawab permasalahan di bidang pertanian ---> pengembangan teknologi tepat guna sangat diperlukan.

PAU mengembangkan sasaran pada Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi di Indonesia baru masyarakat-masyarakat pengguna. Tantangan yang dihadapi Indonesia ---> kebutuhan pangan nabati dan hewani baik kualitas/kuantitas. Eksport hasil Non-migas ---> mengembangkan agroindustri.

PAU ----> memiliki berbagai macam audiovisual yang dapat dimanfaatkan oleh LPM IPB + model-model dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan --- pada swasta, Industri dan lain-lain dan masyarakat menengah kebawah dengan modifikasi tertentu.
----> merupakan asset IPB, memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada di IPB.

Diskusi:

1. Sjafri Mangkuprawira: Belum jelas kaitan PAU dan LPM. Seiauh mana bentuk-bentuk riset PAU yang telah bisa dimanfaatkan. LPM harus mampu menangkap dan menyebarluaskan.
2. Roekasah: Pada Perguruan Tinggi ada Tri Darma. Pendidikan jelas. Pendidikan berkaitan dengan Penelitian untuk mengembangkan ilmu. Kaitan antara Pengabdian dan Penelitian. Menyampaikan ilmu yang ada di IPB kepada masyarakat yang dapat mengetahui apa kebutuhan masyarakat ---> Pengabdian Masyarakat seberapa jauh usulan Pengabdian Masyarakat oleh Fakultas dapat dikriteriakan (10 --- menurut Lutfi I. Nasotion) sebelum diterjunkan ke masyarakat. Untuk membantu Pengabdian

Masyarakat dalam menyeleksi. Peranan IPB pada Pengabdian masyarakat ---> misalnya BIMAS. Secara organisatoris hubungan antara Lembaga Penelitian ---> Koordinasi intern dalam Pengabdian Masyarakat. Karena Raker ini untuk menghasilkan program Kerja bukan teoritis.

3. Kadarwan: Bagaimana mekanisme untuk bisa berpartisipasi dalam PAU-IPB, sehingga semua merasa ikut memiliki.

Jawab:

- 1-2. Secara operasional PAU (3) dibawah koordinator Direktur Pasca Sarjana karena banyak berkaitan dengan program Pasca Sarjana. Kegiatan pengumpulan kredit dan lain-lain. Training yang agak lepas - terbuka untuk orang luar, instansi pemerintah Perguruan Tinggi dan lain-lain. Seminar dan lain-lain juga agak lepas. Tidak hanya penelitian yang ada PAU tapi juga pemanfaatan sumberdaya (training dan lain-lain). Bagaimana status PAU belum jelas. Apapun bentuk kelembagaannya tapi ini merupakan asset IPB. Dalam penelitian akan ada pertemuan antara kelembagaan.
3. Prosedur: PAU akan menyebarkan undangan/brosur kegiatan pada unit-unit di IPB dan instansi lain. Setiap kegiatan akan disebarakan leaflet. Pendaftaran misalnya training harus ada izin atasan yang bersangkutan. Dana disediakan untuk staf PTN yang mengikuti kegiatan setiap kegiatan PAU terbuka.
1. Seiauh mana hasil riset dapat dimanfaatkan ---> penelitian ada yang jangka pendek, panjang misalnya pembuatan tepung singkong, melalui introduksi pengolahan dan pengeringan. PAU biotek ---> penyebarluasan kapsul mikoriza dan lain-lain. PAU cukup jeli ---> teknologi yang diteliti agar dapat dimanfaatkan di masyarakat.

NOTULEN DISKUSI SESSION VI

Pemrasaran : 1. Arifin Yoesoef
 2. H. Muhammad Amin
 Ketua Sidang : Prof. Dr. Ir. Sarsidi S.
 Sekretaris Sidang : Ir. Sunatmo Sardono
 Jam : 10.45 - 12.30

NAMA DAN PERTANYAAN MAKALAH 13 DAN 14

Dr. Hadi S. Alikodra

Ditujukan kepada Ka Biro Pemerintahan DKI Jawa

(1) Pada sebelah kiri dan kanan jalan Tol Cengkareng, yang sebelumnya merupakan daerah rawa (ekosistem lahan basah - wetland ecosystem), pada dua tahun terakhir ini sedang dilakukan penimbunan rawa-rawa, yang mungkin tujuannya untuk pembangunan Real Estate. Namun mengingat Cengkareng merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara, maka ada kesan proses perusakan lingkungan sedang berlangsung di daerah ini.

(2) Menyarankan ada forum pertemuan khusus sebagai lanjutan Raker LPM ataupun Rakorbang Daerah, untuk meluruskan dan mencari kesepakatan mengenai tujuan, program/proyek dan mekanisme kerjasama antara LPM IPB dengan Pemda.

Herry Budiyono (Ditjen. Bangdes)

Dalam Pembangunan Wilayah yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang, khususnya dalam menangani masalah perumahan oleh Developer.

Masalahnya : banyak fasilitas-fasilitas peribadatan, tanam, dll. dihilangkan.

Pertanyaannya: apakah didalam pemberian izin oleh yang bersangkutan kurang diperketat. Agar tidak terdapat kasus-kasus seperti tersebut (JABOTABEK).

Saran : Dalam menangani kemacetan transportasi tidak musiman seperti kasus terminal Pasar Minggu yang melibatkan Satgas tidak tambal sulam, tapi dipikirkan jangka panjang, misalnya bangunan di pojok dibebaskan agar masalahnya terpecahkan.

- Jabar didalam menerima laporan dari DKI tentang daerah industri yang akan dialihkan ke daerah ini perlu dipertimbangkan karena Jabar daerah pertanian yang terkenal seperti berasnya.

- Juga dampak negatifnya.

Dr. Dodi Nandika

1. Apakah mungkin Bappeda Tingkat I ikut berperan sedemikian rupa sehingga sebelum KKN di Kabupaten tertentu dilaksanakan, terlebih dulu dilakukan pertemuan/rapat koordinasi antar LPM IPB dengan dinas terkait di daerah.
2. Dapatkah dibuat edaran kepada seluruh Ketua Bappeda Tk II di Jabar bahwa untuk peninjauan dosen pembimbing KKN IPB ke kecamatan belum diperlukan izin sospol.

Prof. Sarsidi

Pertanyaan ditujukan baik kepada Bappeda Tk I Jabar maupun Biro Bina Pemerintahan DKI.

Peran IPB dalam membantu pembangunan/pengembangan daerah/wilayah kelihatannya tetap diharapkan. Namun demikian untuk merealisasikan peran IPB khususnya dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat sering menghadapi permasalahan dalam hal keterbatasan dana yang dimiliki IPB (c.a. LPM). Pertanyaannya

Pertanyaan

Mungkinkah dalam penyusunan rencana/program pembangunan daerah/wilayah dapat disusun secara bersama antara PEMDA dengan LPM IPB, sehingga realisasi peran IPB dapat terlaksana secara berkesinambungan sesuai dengan harapan PEMDA.

JAWABAN PERTANYAAN

- I. Dr. Hadi
- II. Herry (Karawang)
- III. Sarsidi

I. Hadi ---> DKI

1. Bina Pemerintahan
 - setelah lengkap -- DKI
 - konversi pengamatan lahan basah --> tapi ternyata akhir ini ada perumahan
 - Di daerah perlu ... ada perumahan mengapa ?

2. IPB

-----> kebijaksanaan oleh peraturan Daerah

Agar keputusan-keputusan yang berlaku ini supaya aturan-aturan yang melembaga dalam kebijaksanaan antara LPM + Pemda Tk I + II.

II. Herry : Karawang

1. penanggulangan pertanian ---> kawasan industri.
Karawang : 5500 ha ---> berkembang.

Hutan 13.500 ha (industri) antara industri + pertanian ada kontradiksi.

Pertanyaan :

1. Apakah Karawang sebagai pemasok padi bisa dipertahankan dengan kawasan industri.
 2. Perlu adanya teknologi tepatguna pada kawasan industri.
 3. Agar pihak IPB bisa di Karawang terhadap dampak kawasan industri ?
- * Keppres-Keppres lama + baru timbul industri yang akan menguasai lahan pertanian.
 - * Pengembangan
 - * Pembangunan listrik

Mohon pertimbangan hal tersebut di atas

4. Perlu adanya kesepakatan bersama antara LPM + + Pusat ---> Tingkat I. Pusat. Tingkat II

III. Sarsidi

- DKI + Jabar
-/peranan ada di DKI + Jabar
- Permasalahan dana terbatas
- KKN ---> kendala
- * keterbatasan sarana pembangunan
- * keterbatasan sarana produksi untuk aksi yang dilakukan mahasiswa

Apakah tidak mungkin penyusunan Program Bersama dengan pemecahan permasalahan (dana, dsb) IPB.

IV. Dadang

Jabar : KKN

1. Apakah Bappeda Tk I berbuat sedemikian sehingga Bappeda Tingkat II menemukan antara sektor-sektor industri + KKN.
2. Masalah izin peninjauan di tingkat kecamatan. Bagaimana kebijaksanaan Tk I bisa memecahkan masalah ini.

Jawaban

Pak Hadi

- (1) Pengembangan Barat Laut dan sebagian utara ---> 2 kelurahan.
 - rawa-rawa penampungan air + proyek-proyek, penampungan air sudah tidak ada.
 - > sudah akan berubah peruntukannya. Dengan catatan alasan-alasan bangunan.
 - Memang untuk pemerintahan
 - > Harun (Karawang)
 - Tak ada pengembangan pantai
 - Hanya pengamatan pantai tidak kepada pengrusakan
 - > Sarsidi
 - mendukung

II. Jawaban Eddem

---> Hadi ad. 2

ad.2. Rakorbang Tingkat I

di luar sistem Tk II ---> program

---> Harun

- Apa kebijaksanaan sebelum Lumbung padi Jabar.

---> Tetap

Tapi telah mencukupi kemungkinan dalam bergeser

- Bahan usulan untuk pupuk urea bagi IPB.

---> Dodi

- KKN ---> Tk II -- yang sesuai harap diperlancar

- Semua dalam proses/prosedur KKN diperlancar

---> Sarsidi

- Usul diterima

- Disampaikan pada pertemuan

- Pertemuan dengan Bappeda II + IPB merumuskan program-program LPM + KKN sedang diproses untuk dilaksanakan.

---> Saran-saran akan disampaikan kepada Pimpinan
peran + diterima

- Pembahasan bangdes

Bangdes : Masalah dana

Jawaban : Harap mempelajari prosedur

1. PS untuk Kabupaten DT II dimasukan sekitar bulan Desember - Januari untuk APBD (dibawah 10 juta)
2. PS yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bila tidak ada anggaran DT II boleh via BAngdes ---> dengan memanfaatkan Inpres di daerah dengan instruksi Mendagri ke Gubernur.

NOTULEN DISKUSI SESSION VII

=====

Pemrasaran : 1. Ir. Janti G. Sujana
 2. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis
 Ketua Sidang : Drh. Abdulgani A. Siregar, MS
 Sekretaris : Ir. Dadang Shafruddin
 Jam : 14.00 - 15.25

Penyampaian Makalah :

1. Janti G.S. Makalah XV: Pelayanan IPTEK Pertanian kepada Masyarakat.
 - Negara-negara maju berlomba-lomba menyediakan dana yang besar untuk penelitian.
 - Hasil-hasil penelitian di Indonesia dapat membuktikan teori Malthus tidak benar ---> terbukti Indonesia bisa swasembada.
 - Lihat Makalah XV.
2. Aida V.S. Hubeis: Makalah XVI: Diseminasi IPTEK pada Masyarakat.
 Lihat Makalah XVI

Diskusi:

Pertanyaan/komentar:

1. Tantan:

Dijatuhkan kepada Aida:

 - Teknologi canggih dan non canggih dapat diterapkan dengan memperhatikan segmen-segmen tertentu
 - a. Bagaimana pendapat Ibu?

Kepada Janti: Bagaimana contoh abstrak tersebut?
2. Moentcha:

Kepada Janti: menyangkut aliran informasi, kurang jelas aliran kepada masyarakat/petani, karena dalam gambar harus melalui LSI. Bagaimana sebenarnya?
3. Bangun:

Jaringan kerja dari beberapa instansi/kelembagaan yang saling menguntungkan: jaringan informasi.

 - a. Bagaimana sistem kerja pusat-pusat dan anggota dalam jaringan?
 - b. Delivery System: ada beberapa komponen:
 1. mengidentifikasi sumber-sumber
 2. pengumpulan
 3. peralihan

4. perumusan
 5. bentuk penyesuaian
 - Bagaimana bentuk dan penyampaian informasi?
 - Bagaimana penanganan umpan balik?
4. Syarif Hitam
- Apa mungkin ada duplikasi yang dilakukan LPM dan LSI?
 - LPM dan LSI sama-sama menyampaikan informasi ke petani
 - Lebih baik ada koordinasi LPM-LSI dan Fakultas-fakultas dalam penyampaian informasi.

Jawaban:

1. Janti:

- Abstraknya tidak ada (untuk Pak Tantan)
- Untuk Pak Moentoha:
 - * sebaiknya dipusatkan ke LSI
 - * Tidak menyebarkan informasi ke Petani, tapi hanya membuat publikasi yang dapat disebar ke petani oleh LPM.
- Mengenai jaringan kerja: untuk perpustakaan, LSI masuk ke dalam jaringan perpustakaan nasional
- Format data komputer mengikuti sistem internasional, mencakup 45 perpustakaan.
- Pelayanan modern harus mengutamakan kepentingan pemakai.
- Untuk Pak Syarif, tidak duplikasi, pernah ada pertemuan antara LPM dan LSI.

2. Aida:

- Pernyataan tersebut tidak keliru
- Komentar terhadap Timmer: penggunaan traktor menguntungkan hanya ditinjau dari segi ekonomis.
- Memang koordinasi LSI-LPM belum baik.

3. Siafri M.:

Komentar tentang duplikasi:

- Duplikasi harus dihindari
- LP dapat melaksanakan PPM ---> menurut PP.No. 30/th. 1990, akan tetapi materi, khlayak harus berbeda contohnya:
- Dalam pelaksanaannya karena LPM sebagai koordinator, sebaiknya LPM diberitahu.

Termin II:

1. Siafri M.:

Ditinjau dari peranan LSI: - menyangkut perpustakaan
- publikasi

Apakah mungkin di LSI ada UPT lain?

Untuk mencegah koordinasi yang kurang baik

- Apakah di LSI ada substruktur dimana LP dan LPM terlibat dalam LSI.
 - Apa yang dimaksud tanda panah kode 4?
LPM melakukan kaji tindak apakah masuk kode 4?
 - Dikaitkan dengan diseminasi, apa kaitan dengan LSI?
2. Sadan Widarmana:
- Belum ada kelompok yang dapat menterjemahkan pengetahuan yang langsung dapat digunakan petani.
 - Usul mengadakan pelatihan yang dikelola LPM dan LSI
3. LSI pada tahap sekarang masih bersifat kolektor (kasus perpustakaan).
LSI tidak aktif mendiseminasikan hasil-hasil dan sekarang ini belum bisa.

Jawaban:

Janti:

- LSI sekarang ini memang masih pasif (kasus perpustakaan). Mudah-mudahan pada masa akan datang ada perbaikan.
- Pada pertemuan LSI dan LPM yang akan datang perlu ada pembicaraan lebih lanjut (tentang koordinasi)
- LPM perlu memberi masukan kepada LSI apa yang harus diproduksi.
- Perlu waktu untuk menghasilkan ahli yang dapat membuat publikasi untuk awam.

Aida: komentar Gambar !

Tanda-tanda aneh, dengan menempatkan LSI di tengah-tengah.

Bukan LP yang mensuplai LSI, karena ilmunya masih fure (murni).

Mattjik: LP, LPM dan lain-lain dapat menghasilkan publikasi.

Aida: masih kurang mengerti mengenai tanda panah pada Gambar 1 tersebut.

Siafri M.:

- Sudah saatnya LSI, LPM dan LP bertemu ---> masukkan ke dalam perumusan.

Hasil Diskusi VII:

Disadari bahwa diseminasi iptek merupakan hal penting, karena itu diperlukan penanganan secara serius dengan khusus. Demikian juga dalam hal penyebarluasan iptek kepada masyarakat. Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) yang dalam ide pembentukannya diharapkan dapat berfungsi dalam penyebarluasan iptek ini di dalam prakteknya masih diperlukasi koordinasi dengan kedua lembaga lain yang ada di IPB (LPM dan LP).

BAGIAN D
L A M P I R A N

Lampiran 1. Salinan dari Salinan

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor: 035/Um/1991

tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA
RAPAT KERJA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IPB
TANGGAL 7 - 8 MEI 1991

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB Nomor 25/PT39.Hil.b.l.1/C/91 tanggal 7 Mei 1991, tentang usul pengangkatan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyusun program dan strategi dasar pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi di IPB dianggap perlu untuk mengadakan Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IPB;
- b. bahwa LPM IPB adalah unsur pelaksana koordinasi dan pembinaan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berhubung dengan ad. a dan b tersebut di atas perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1985;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 123/M Tahun 1987;
4. Keputusan Rektor IPB Nomor 014/Um/1989;
5. Keputusan Rektor IPB Nomor 030/Um/1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana Rapat Kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB yang susunan personalianya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB yang berpedoman pada ketentuan yang telah diqariskan oleh IPB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 16 Mei 1991
Pelaksana Harian Rektor,

ttt

Cap

ttt

Ir. Anshary Chaeruddin
NIP 130350061

Prof. Dr. Ir. H. SADAN WIDARMANA
NIP 130212044

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pembantu Rektor IPB,
2. Dekan Fakultas IPB,
3. Ketua Lembaga IPB,
4. Kepala Biro IPB,
5. Dir. Tingkat Persiapan Bersama IPB,
6. Ketua Jurusan pada Fakultas IPB,
7. Kepala UPT - IPB,
8. Kepala Pusat pada LP dan LPM,
9. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan.

Diperbanyak oleh: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 035/Um/1991

Tanggal : 16 Mei 1991

Tentang : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA LEMBAGA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT IPB, 7 - 8 MEI 1991

Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira/Ketua LPM IPB

Ketua Pelaksana : Dr. Ir. Tantan R. Wiradarya/Sekretaris LPM IPB

Sekretaris : M. Ardjo Sudibidjo/Kepala Bagian Tata Usaha LPM IPB

Seksi-seksi

1. Makalah dan prosiding : Ir. Amiruddin Saleh, MS.
2. PERSIDANGAN : Ir. Moentaha Selari, MS.
3. Acara : Ir. Lina Karliyenna, MS.
4. Perlengkapan/logistik : Marthin Wattimena, BA.
5. Dokumentasi : Ir. Maman Suryaman
6. Konsumsi : Marsun

Ketua Sidang:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Dr. Ir. Surdiding Ruhendi, M.Sc | 5. Dr. Ir. Rizal Syarif |
| 2. Prof. Dr. Ir. Sarsidi Sastroumardjo | 6. Prof. Dr. Ir. Kuntjoro |
| 3. Ir. Ismail Pulungan, M.Sc | 7. Drh. Abdulqani A. Siregar, MS |
| 4. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis | |

Sekretaris Sidang:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drh. R. Kurnia Achjadi, MS | 5. Ir. Astiana, M.Sc |
| 2. Drh. R. Suqianto | 6. Ir. Sunatmo Sardono |
| 3. Ir. M. Sjarif Hitam | 7. Ir. Dadang Shafrudin, MS |
| 4. Dr. Ir. Dodi Mandika | |

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. Ir. Sadan Widarmana M.Sc.
2. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira
3. Prof. Dr. Kuntjoro
4. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis
5. Dr. Ir. Surdiding Ruhendi M.Sc.
6. Drh. Abdulqani A. Siregar MS
7. Dr. Ir. Tantan R. Wiradarya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 16 Mei 1991
Pelaksana Harian Rektor,

ttd

Cap

ttd

Ir. Anshary Chaeruddin
NIP 130350061

Prof. Dr. Ir. H. SADAN WIDARMANA
NIP 130212044

Diperbanyak oleh: Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor.

Lampiran 2. Jadwal Acara Rapat Kerja Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor
(Tanggal 7 dan 8 Mei 1991)

| Hari/Tgl./ Waktu | ACARA | PENYAMPAIAN | Ketua Sidang | Sekretaris Sidang | Ket. |
|-----------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|---------|
| Selasa, 7 Mei 1991 | | | | | |
| 08.00-08.45 | Pembukaan - Laporan Ketua Penyelenggara - Sambutan Ketua LPM IPB - Sambutan pengarah dan pembukaan secara resmi Dih : Rektor IPB | ----- | ----- | ----- | Panitia |
| 08.45-09.00 | ----- | Ramah Tamah | ----- | ----- | Panitia |
| 09.00-10.00 | Penyampaian Makalah 1 dan 2 | Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira (Ketua LPM IPB) | Dr. Ir. Suredin R., M.Sc | Ir. Lina Karliyenna, MS. | |
| 10.00-10.30 | Penyampaian Makalah 3 | Prof. Dr. Ir. Sadan Widarmana (Pembantu Rektor I IPB) | --- sda --- | --- sda --- | |
| 10.30-11.15 | Diskusi I | --- sda --- | --- sda --- | --- sda --- | |
| 11.15-11.35 | Penyampaian Makalah 10 | Pembantu Dekan I Fateta | Dr. Ir. Aida V.S. Mubeis | Drh. R. Sunjarto | |
| 11.35-11.55 | Penyampaian Makalah 5 | Pembantu Dekan I FKM | --- sda --- | --- sda --- | |
| 11.55-12.40 | Diskusi II | --- sda --- | --- sda --- | --- sda --- | |
| 12.40-13.30 | ----- | Istirahat/Makan siang | ----- | ----- | Panitia |
| 13.30-13.50 | Penyampaian Makalah 6 | Pembantu Dekan I Faperikan | Ir. Ismail Pulungan, M.Sc | Ir. M. Sjarif Hitan | |
| 13.50-14.10 | Penyampaian Makalah 7 | Pembantu Dekan I Fapet | --- sda --- | --- sda --- | |
| 14.10-14.30 | Penyampaian Makalah 8 | Pembantu Dekan I FMIPA | --- sda --- | --- sda --- | |
| 14.30-15.15 | Diskusi III | --- sda --- | --- sda --- | --- sda --- | |
| 15.15-15.40 | ----- | B r e a k | ----- | ----- | Panitia |
| 15.40-16.00 | Penyampaian Makalah 9 | Pembantu Dekan I Fakultas | Prof. Dr. Ir. Garsidi | Dr. Ir. Dodi Nardita, MS | |
| 16.00-16.20 | Penyampaian Makalah 4 | Pembantu Dekan I Faperta | --- sda --- | --- sda --- | |
| 16.20-17.00 | Diskusi IV | --- sda --- | --- sda --- | --- sda --- | |

Lanjutan Jadwal Acara

| Hari/Tgl./ Waktu | Acara | P E R A S A B A N | Ketua Sidang | Sekretaris Sidang | Ket. |
|---------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Rabu, 8 Mei 1991 | | | | | |
| 08.30-09.00 | Penyampaian Makalah 11 | Ketua Lembaga Penelitian | Dr. Ir. Rizal Sjarief | Ir. Astiana, M.Sc | |
| 09.00-09.30 | Penyampaian Makalah 12 | PMU, (diwakilikan kepada Dr. Ir. Widayat Syarif) | --- sda --- | -- sda -- | |
| 09.30-10.15 | Diskusi V | --- | --- | -- sda -- | |
| 10.15-10.45 | ----- B r e a k ----- | | | | Panitia |
| 10.45-11.15 | Penyampaian Makalah 13 | Ketua Bappeta Jabar | Prof. Dr. Ir. Kuntjoro | Ir. Sunatao Sardono | |
| 11.15-11.45 | Penyampaian Makalah 14 | Kepala Biro Bina Pemerin- tahan DMI Jaya | --- | -- sda -- | |
| 11.45-12.30 | Diskusi VI | --- | --- | -- sda -- | |
| 12.30-13.30 | ----- Istirahat/Makan siang ----- | | | | Panitia |
| 13.30-14.00 | Penyampaian Makalah 15 | Ketua LSI | Drh. Abdulqani A.S., MS | Ir. Dadang Sjafrudin, MS | |
| 14.00-14.30 | Penyampaian Makalah 16 | Kapus. P2M LPM IPB | --- | -- sda -- | |
| 14.30-15.15 | Diskusi VII | --- | --- | -- sda -- | |
| 15.15-16.00 | ----- Break/Perumusan ----- | | | | Panitia/Tim Perumus |
| 16.00-16.45 | P e n u t u p a n | | | | |
| | - Laporan Ketua Penyelenggara | | | | |
| | - Pembacaan Hasil Perumusan Raker P2M IPB | | | | |
| | - Sambutan dan Penutupan Raker dengan resmi oleh PR I IPB | | | | |

Lampiran 3a. Daftar Peserta Rapat Kerja LPM IPB Hari Pertama
Tanggal 7 Mei 1991

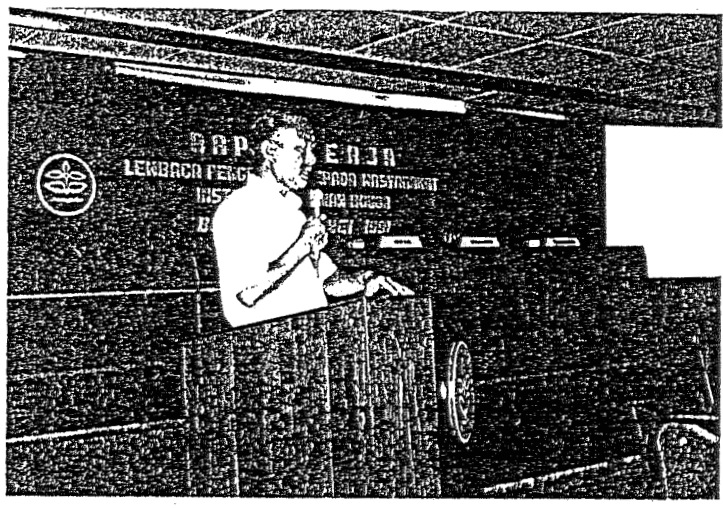
| NO. | N A M A | INSTANSI/ALAMAT |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | DRS. HERRY BUDIYONO | DITJEN PEMBANGUNAN DESA |
| 2. | DRS. M. PANGABEAN | DITJEN PEMBANGUNAN DESA |
| 3. | WASRIN SYAFII | FAHUTAN IPB |
| 4. | DR. IR. SURDIDING BUHENDI | LPM IPB |
| 5. | PROF. KUNTJORO | LPM IPB |
| 6. | Y. N. BANGUN | BADAN DIKLAT PERTANIAN |
| 7. | HADIYANTO | BAPPEDA KABUPATEN BOGOR |
| 8. | IR. H. HIDMAT SUGHLANA | BAPPEDA KABUPATEN BOGOR |
| 9. | DR. IR. AIDA VITAYALA S. HUBEIS | LPM IPB |
| 10. | PROF. DR. IR. SARSIDI S. | BDP FAPERTA |
| 11. | GELAR WIRA ATMADJA | JL. RUMAH SAKIT II NO. 17 |
| 12. | DR. PALLAWARUKKA | FAPET IPB |
| 13. | DR. IR. A. A. MATTJIK | FMIPA IPB |
| 14. | DR. IR. BAMBANG PRAMUDYA | FATETA IPB |
| 15. | IR. SIMAMORA | FAPET IPB |
| 16. | IR. LINA KARLIYENNA. MS | LPM IPB |
| 17. | IR. ISMAIL PULUNGAN. MS | FAPET IPB |
| 18. | PROF. DR. IR. SITANALA ARSYAD | REKTOR IPB |
| 19. | PROF. DR. IR. SADAN WIDARMANA | PEMBANTU REKTOR I IPB |
| 20. | RUSDAN S. | BANGDA DDM |
| 21. | DRS. EDEM K. | BAPPEDA JABAR |
| 22. | DR. IR. RIZAL SYARIEF | POSBANGTEPA LP IPB |
| 23. | IR. M. SJARIEF HITAM | FAPERIKAN IPB |
| 24. | M. FAUZAN | BAPPEDA TK. II KARAWANG |
| 25. | IR. SUNATMO SARDONO | FAPERIKAN IPB |
| 26. | S. ROEKASAH A. | SOSEK |
| 27. | DR. IR. KADARWAN SOEWARDI | FAPERIKAN IPB |
| 28. | DR. IR. HIDAYAT SYARIEF | FAPERTA IPB |
| 29. | BAMBANG T. R. | BAPPEDA KABUPATEN CIREBON |
| 30. | DR. IR. DODI NANDIKA | FAHUTAN IPB |
| 31. | DRH. SUGIJANTO | FKH IPB |
| 32. | IR. DADANG SHAFRUDIN | FAPERIKAN IPB |
| 33. | PROF. DR. IR. JUJU WAHJU | FAPOLTAN IPB |
| 34. | DR. IR. TANTAN R. WIRADARYA | LPM IPB |
| 35. | DRH. ABDULGANI A. SIREGAR. MS | LPM IPB |
| 36. | DR. IR. HADI S. ALIKODRA | FAHUTAN IPB |
| 37. | DR. IR. YAHYA FAKUARA | FAHUTAN IPB |
| 38. | IR. AMIRUDDIN SALEH. MS | LPM IPB |

Lampiran 3b. Daftar Peserta Rapat Kerja LPM IPB Hari Kedua
Tanggal 8 Mei 1991

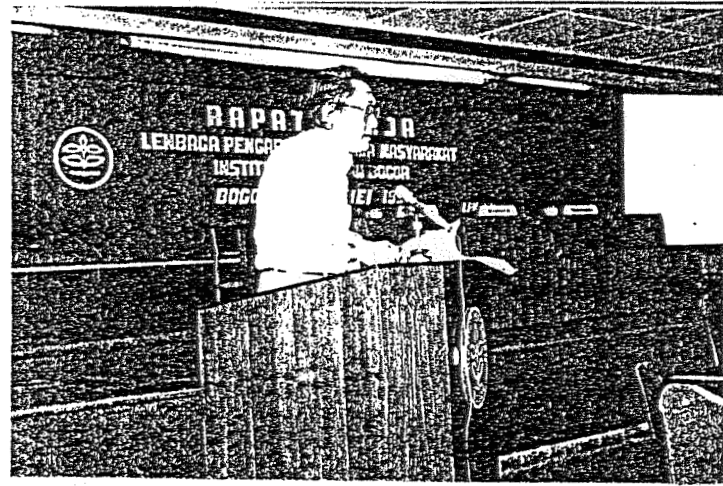
| NO. | N A M A | INSTANSI/ALAMAT |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | HARUN FIRDAUS | PEMDA KARAWANG |
| 2. | DR. IR. RIZAL SYARIEF | PUSBANGTEPA LP IPB |
| 3. | DES. HERRY BUDIYONO | DITJEN PEMBANGUNAN DESA |
| 4. | DES. M. PANGABEAN | DITJEN PEMBANGUNAN DESA |
| 5. | DR. IR. KADARWAN SOEWARDI | FAPERIKAN IPB |
| 6. | SUMARYA | FKH IPB |
| 7. | DR. IR. HIDAYAT SYARIEF | PAU IPB |
| 8. | RUSDAN S. | BANGDA DDN |
| 9. | DR. IR. SURDIDING RUHENDI | LPM IPB |
| 10. | IR. AMIRUDDIN SALEH, MS | LPM IPB |
| 11. | GELAR WIRA ATMADJA | JL. RUMAH SAKIT II NO. 17 |
| 12. | DRH. R. KUERNIA ACHYADI, MS | FKH IPB |
| 13. | SRIJADI | - |
| 14. | Drs. EDEM K. | BAPPEDA JABAR |
| 15. | M. SIAT | - |
| 16. | S. BOEKASAH A. | SOSEK |
| 17. | JONATAN JOHAN | - |
| 18. | Y.N. BANGUN | BADAN DIKLAT PERTANIAN |
| 19. | DR. IR. TANTAN E. WIRADARYA | LPM IPB |
| 20. | DR. IR. DODI NANDIKA | FAHUTAN IPB |
| 21. | A. AMANG | |
| 22. | M. FAUZAN | BAPPEDA TK. II KARAWANG |
| 23. | IR. H. HIDMAT SUGHIANA | BAPPEDA KABUPATEN BOGOR |
| 24. | HADIYANTO | BAPPEDA KABUPATEN BOGOR |
| 25. | PROF. DR. IR. SABSIDI S. | LPM IPB |
| 26. | H.M. AMIN | BIBO BINA PEMERINTAHAN DKI |
| 27. | IR. JANTI G. SUJANA, MSc | LSI IPB |
| 28. | I N. SUASTAWA | FATETA IPB |
| 29. | PROF. DR. IR. SADAN WIDARMANA | PEMBANTU REKTOR I IPB |
| 30. | DR. IR. SJAFRI MANGKUPRAWIRA | LPM IPB |
| 31. | DRH. ABDULGANI A. SIREGAR, MS | LPM IPB |
| 32. | DR. IR. AIDA VITAYALA S. HUBEIS | LPM IPB |
| 33. | DR. IR. BAMBANG PRAMUDYA | FATETA IPB |
| 34. | DR. IR. HADI S. ALIKODRA | FAHUTAN IPB |
| 35. | IR. ASTIANA, MSc | FAPERTA IPB |
| 36. | PROF. DR. IR. Kuntjoro | LPM IPB |
| 37. | IR. SUNATMO SARDONO | FAPERIKAN IPB |
| 38. | IR. DADANG SHAFRUDIN, MS | FAPERIKAN IPB |

Lampiran 4.

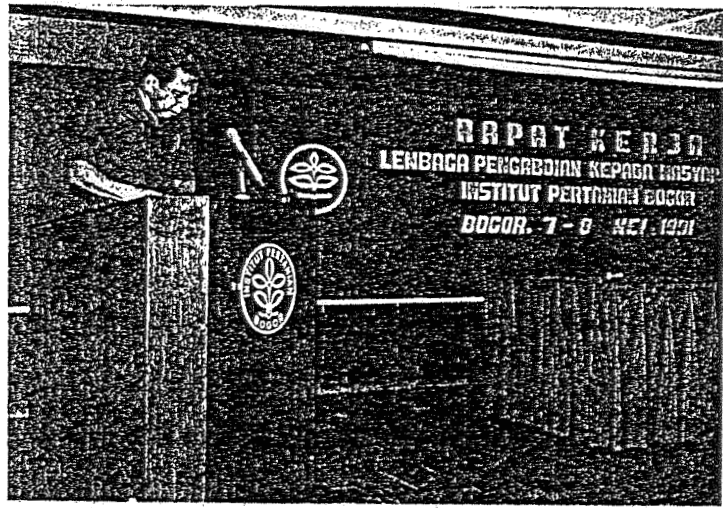
Beberapa Foto Aktivitas Rapat Kerja LPM IPB.
Tanggal 7 dan 8 Mei 1991



Laporan Ketua Panitia Raker
Dr. Ir. Tantan R. Wiradarya di Aula LPM.



Ketua LPM IPB, Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira
tengah memberikan sambutan pada acara Pembukaan.



Sambutan dan pengarahan Rektor IPB,
Prof. Dr. Ir. H. Sitanala Arsyad
dalam acara pembukaan



Session I, tampak Ketua LPM IPB Dr. Ir. Siafri Mangkuprawira tengah menyampaikan makalah tentang kegiatan LPM serta strategi PPM periode 1991-1993



Pada Session I ini tampak pula Pembantu Rektor I IPB Prof. Dr. Ir. Sadan Widarmana tengah menyampaikan makalah tentang koordinasi kegiatan PPM serta hal lain yang berkaitan dengan institusi.



Program PPM Fakultas tengah disampaikan oleh PD I Fateta, Dr. Ir. Bambang Pramudya dan PD I FKH, Drh. Sunarya Prawiradisastra.



Dr. Ir. Kadarwan S., Dr. Ir. Pallawarukka, dan Dr. Ir. A.A. Mattiik sedang menyampaikan Program PPM dari masing-masing Fakultas mereka.



Dr. Ir. Hidayat Siarief dan Dr. Ir. Yahya Fakuara, masing-masing PD I Fakultas Pertanian dan Kehutanan telah menyampaikan makalah tentang PPM di Fakultas masing-masing.



Ketua LP IPB, Dr. Ir. Lutfi L. Nasution dan Wakil dari PAU IPB, sedang menyampaikan makalahnya tentang teknologi tepat guna.



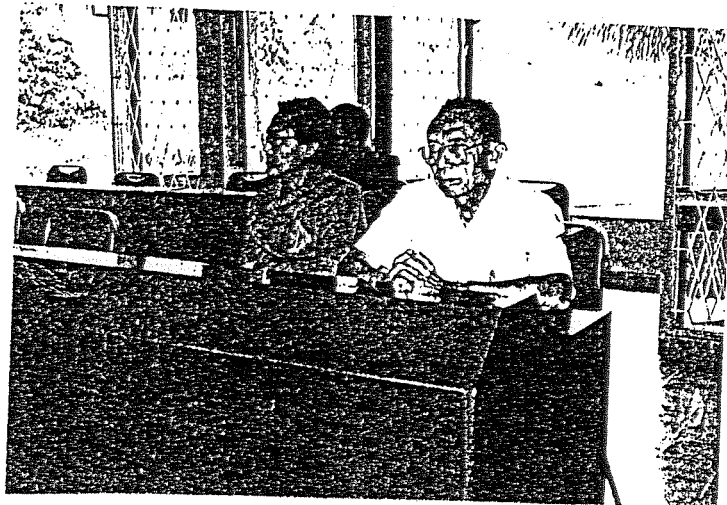
Makalah bertemakan peranan IPB dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, disampaikan dari BAPPEDA DT I Jawa Barat serta Biro Bina Pemerintahan DKI Jaya.



Session terakhir berupa penyajian makalah dari LSI dan Pusat P2M LPM IPB, dipimpin oleh Drh. Abdulgani A. Siregar, MS.



Tampak mantan Ketua LPM IPB, Ir. Gelar Wira Atmadia dan Prof. Dr. Ir. Roekasah ikut rembuk dan menyemarakkan Raker LPM IPB ini.



Demikian pula Prof. Dr. Ir. Yuyu Wahyu, Ketua LPM periode 1980-1983, turut pula memberikan sumbangan pemikiran untuk program kerja LPM masa yang akan datang.



Akhirnya tampak dengan hikmat dan penuh optimis Prof. Dr. Ir. Sadan Widarmana dengan resmi menutup Raker LPM IPB tanggal 7 - 8 Mei 1991 ini.

oooOooo